

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 05**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 689 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2006**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah  
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung  
Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis  
(Renstra) Kota B andung Tahun 2004-2008;**

**b bahwa ...**

- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk Tahun 2006 perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006 sebagai rangkaian pembangunan tahunan dengan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pembanguann kota yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Me  
mperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2006.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kota Bandung dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaanya.

(2) Untuk ...

(2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sebagai berikut :

A. NASKAH RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BANDUNG;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ISU-ISU STRATEGIS  
PEMBANGUNAN KOTA  
BANDUNG

BAB III : RANCANGAN  
KERANGKA EKONOMI  
DAERAH

BAB IV : PEMBANGUNAN  
WILAYAH

BAB V : PRIORITAS  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

BAB VI ...

BAB VI : RINGKASAN  
PENDANAAN

BAB VII : KAJIAN PELAKSANAAN

BAB VIII : PENUTUP

B. MATRIKS RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

Pasal 3

Naskah dan Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi program prioritas maupun arahan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 5...

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

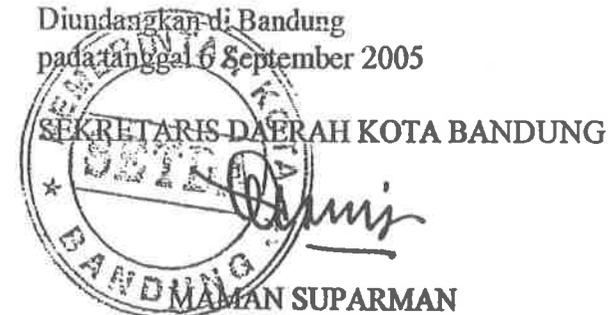
Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 September 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 September 2005



BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 05

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 689 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 6 September 2005**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**(RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Landasan Hukum	I - 3
	1.3 Visi dan Misi	I - 4
	1.4 Maksud dan Tujuan	I - 5
	1.5 Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD	I - 6
	1.5.1 Proses Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2006	I - 6
	1.5.2 Sistematika Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2006	I - 8
BAB II	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG	II - 1
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH	III - 1
	3.1 KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2004	III - 1
	3.2 PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2006 DAN PENCAPAIANNYA	III - 9
BAB IV	PEMBANGUNAN WILAYAH	IV - 1
	4.1 Pembangunan Wilayah Pengembangan	IV - 2
	4.2 Pengembangan Kawasan Khusus	IV - 4
	4.2.1 Pengembangan Kawasan Pusat Primer Gedebage	IV - 4
	4.2.2 Pengembangan Koridor Jalan Arteri Pasteur-Cibiru	IV - 7

	4.2.3 Pengembangan Kawasan Tamansari	IV - 9
	4.2.4 Penataan Kawasan Puncut	IV - 12
	4.2.5 Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Margasenang Kecamatan Margacinta	IV - 15
	4.2.6 Penataan Kawasan Industri Dalam	IV - 17
	4.2.7 Penataan Kawasan Cagar Budaya	IV - 19
	4.2.8 Penataan Kawasan Tegalega	IV - 20
	4.2.9 Penataan Kawasan Agrowisata, Seni Budaya Ujung Berung	IV - 21
BAB V	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	V - 1
	5.1 Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2006	V - 1
	5.2. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2006	V - 4
BAB VI	RINGKASAN PENDANAAN	VI - 1
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1
	LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya menuntut suatu konsekuensi yang mendorong terjadinya perubahan dalam proses implementasi di daerah.

Perubahan tersebut, selain merupakan tuntutan reformasi yang mengharuskan pemerintahan lebih responsif, transparan dan akuntabel, juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika organisasi publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mendukung Undang Undang tersebut pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan berupa rencana kerja pemerintah sebagai tahapan pelaksanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan.

Sehubungan dengan penetapan Undang-Undang tersebut sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung belum menyusun RPJMD, dengan demikian Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2004-2008 yang telah ditetapkan melalui Perda No 06 tahun 2004 dianggap sebagai RPJMD sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Pelaksanaan Renstra Kota Bandung telah memasuki tahun ke-3 yang rencana tahunannya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. sehingga wujud dari perencanaan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up.

Berdasarkan pasal 25 ayat 1 UU No 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat 2 UU No 33 tahun 2004 dan Pasal 17 ayat 2 UU No 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

1. Pengamanan dan pengendalian kawasan cagar budaya, melalui kegiatan pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan.
2. Pengembangan pola insentif dan disinsentif antara lain dengan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum seperti gangguan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.
3. Perlindungan atas pengembangan perumahan vertikal yang mengganggu fungsi cagar budaya dan pelestarian bangunan.

#### 4.2.8. Penataan Kawasan Tegalega

Dalam rangka memenuhi ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan 10 % dari total luas Kota untuk digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau hal ini sebagaimana yang telah di gariskan dalam Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

Dalam menjabarkan Program tersebut, Pemerintah Kota telah menetapkan Kawasan Tegalega sebagai Kawasan yang mempunyai fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, untuk mencapai Ruang Terbuka Hijau tersebut pada tahun 2005 telah dilakukan Penataan melalui Revitalisasi Kawasan.

Adapun dalam penanganan Penataan Kawasan Tegalega di tahun 2005 ini akan dilakukan kegiatan Penataan Monumen Bandung Lautan Api (BLA), Perumputan, Penanaman Pohon dan Penataan di sekitar Ring Dalam Monumen Tegalega, namun demikian kegiatan pada tahun 2005 ini belum dapat

memfungsikan Tegalega sebagai Ruang Terbuka Hijau yang utuh. Untuk itu pada tahun 2006 akan dilakukan kegiatan-kegiatan terusan di Kawasan Tegalega sebagai langkah menuju kawasan Ruang Terbuka Hijau yang utuh.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Tegalega adalah :

- a. Program pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Program penataan prasarana dan sarana kota
- c. Program peningkatan hukum

Adapun Indikasi kegiatan yang akan dan perlu dilaksanakan pada tahun 2006 di Kawasan Tegalega ini meliputi :

1. Pengalihan fungsi Kolam Renang dan lahan parkir untuk menjadi Lapangan Sepakbola sebagaimana pada sisi Barat.
2. Perbaikan *Boulevard*
3. Penataan Parkir Sebelah Barat
4. Perbaikan Monumen
5. Pembangunan Diorama
6. Penataan Jalan baik di dalam maupun di luar kawasan Tegalega
7. Pembangunan *Amphi theatre*, gasebo, toilet, dan *therapi stone*.

#### 4.2.9 - Penataan Kawasan Agrowisata Seni Budaya Ujung Berung

Daerah Ujung Berung memiliki potensi seni budaya yang sangat besar, pagelaran seni budaya cukup marak belakangan ini,

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
10. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2005 tentang APBD Kota Bandung.

### 1.3. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008, memuat arah kebijakan pembangunan Kota Bandung yang terintegrasi dan berkelanjutan secara bertahap dituangkan dalam perencanaan pembangunan tahunan. Dengan Visi yang ingin dicapai adalah ***Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat).***

Keinginan luhur ini, merupakan hasil kesepakatan bahwa Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan berfungsi sebagai Kota Kolektif dan Distributif barang dan jasa, sehingga kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius;
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil;
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani;
4. Meningkatkan penataan kota;
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
6. Mengembangkan sistem keuangan kota.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2006, dimaksudkan untuk  
RKPD Kota Bandung Tahun 2006

memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan, dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kota Bandung, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Agar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, memiliki Rencana Kerja (RENJA SKPD) tahun 2006 yang relevan dan konsisten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004, tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004 – 2008.
2. Agar RKPD ini menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2006.

## **1.5. Proses Dan Sistematisa Penyusunan RKPD**

### **1.5.1. Proses Penyusunan RKPD Kota Bandung tahun 2006**

- a. Penyiapan rancangan awal Rencana Kerja, meliputi hasil evaluasi tahunan dari : Perubahan kebijakan

nasional (RKP), Perubahan-perubahan indikator ekonomi daerah, Ketersediaan sumberdaya daerah seperti estimasi pendapatan, Isu-isu & Masalah-masalah baru yang harus ditangani, Temuan kebutuhan masyarakat yang mendesak, dan Penyesuaian Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- b. Penyiapan rancangan rencana kerja meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan RENSTRA SKPD/Dinas dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada RENSTRA Kota Bandung dan bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) masing-masing sektor dan diajukan ke Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah tahun berjalan yang kemudian dikemas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang berisi Implementasi Program.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan, melalui tahapan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan,

dan Musrenbang Tingkat Kota dalam rangka penjangkaran aspirasi, Sinkronisasi Program SKPD dan Harmonisasi Desentralisasi, Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan

- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, memuat Prioritas Pembangunan, Kebijakan Umum, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kerangka Ekonomi makro daerah dan Program SKPD.

### **1.5.2. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Bandung tahun 2006**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2006, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang : A. Latar belakang penyusunan, terdiri dari : Visi dan Misi Daerah, dan Isu-isu Strategis Pembangunan. B. Maksud Dan Tujuan, C. Proses Dan Sistematika Penyusunan RKPD.

#### **Bab II. ISU – ISU STRATEGIS**

Bab ini menguraikan tentang isu –isu strategis secara makro dan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung sesuai dengan misi rencana strategis.

#### **Bab III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH KOTA BANDUNG**

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi makro tahun 2004, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 dan pencapaiannya.

#### **Bab IV. PEMBANGUNAN WILAYAH**

Bab ini menguraikan tentang Pembangunan Wilayah Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Khusus

#### **Bab V. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2006**

Bab ini menguraikan tentang Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2006 dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2006, terdiri dari aspek-aspek pembangunan, yaitu ; SDM, Ekonomi, Sosial Budaya, Penataan Kota, Pemerintahan Kota dan bidang Pembiayaan Kota, yang

dikelompokkan kedalam kelompok program yang terkait langsung dengan IPM dan Kelompok Program Penunjang pencapaian IPM.

#### Bab VI. RINGKASAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Sumber sumber pembiayaan yang digunakan pada pelaksanaan Pembangunan di Kota Bandung, sesuai dengan prioritas program yang telah dikemukakan di Bab III.

#### Bab VII. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2006 , tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

## BAB II

### ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

Kota Bandung dalam konteks pembangunan nasional sesuai dengan PP No 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping 14 kota yang lainnya yaitu Medan, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Manado, Ujung Padang, Biak. Disamping itu dalam RTRWN tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung ditetapkan juga sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian tanaman pangan, pariwisata dan perkebunan. Sedangkan dalam konteks pembangunan regional sesuai dengan Perda Propinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2003 tentang RTRW Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat disamping DKI Jakarta.

Peran strategis kota Bandung tersebut di atas menuntut adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk maksud tersebut maka perlu dirumuskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan isu-isu strategis sebagai berikut:

Pembangunan Kota Bandung dalam konteks regional di era otonomi saat ini menjadi salah satu isu strategis mengingat kota Bandung terbuka terhadap wilayah di sekitarnya disamping peranannya sebagai pusat pertumbuhan yang ditunjang dengan kelengkapan infrastruktur pelayanan serta memiliki iklim yang sejuk, mendorong migrasi penduduk dari wilayah di sekitarnya. Disatu sisi peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dengan berbagai aktivitasnya menuntut adanya peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan, sedangkan disisi lain tidak mungkin Pemerintah Kota dengan segala keterbatasan, dana dan sumber daya lingkungan, diharapkan akan menyediakan fasilitas pelayanan tersebut secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dengan wilayah di sekitarnya dalam perumusan kebijakan secara terpadu.

Dari uraian tersebut di atas maka salah satu isu strategis dalam pembangunan kota Bandung adalah ***tingkat pelayanan publik baik yang berskala regional maupun kota belum dapat dilaksanakan secara optimal***, yaitu mencakup pelayanan di bidang transportasi kota, kesehatan, pendidikan, kebersihan dan keindahan lingkungan, air bersih, air kotor, sampah, banjir, tata ruang (kawasan konservasi) dan sebagainya.

Pembangunan, peningkatan dan pemberdayaan pendidikan bukan hanya dituntut oleh kebutuhan internal masyarakat Kota Bandung, tetapi juga dipengaruhi tuntutan dinamika eksternal yang dalam pelaksanaannya membutuhkan terobosan baru yang strategis.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002, dalam pelaksanaannya terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu visi pendidikan Kota Bandung kedepan yang semula menciptakan masyarakat Kota Bandung yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terpelajar, pembelajar dan berbudaya serta terbaik di Jawa Barat, diarahkan menjadi terwujudnya masyarakat Kota Bandung yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia guna mendukung Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, dimana realisasinya dalam bentuk "Bandung Cerdas 2008".

Penanggulangan sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks terutama berkaitan dengan tingginya volume sampah dan terbatasnya ketersediaan lahan. Keterbatasan lahan ini mengakibatkan kota Bandung membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Terjadinya bencana longsor di TPA Leuwigajah beberapa

waktu yang lalu, menjadikan kota Bandung kesulitan untuk membuang sampah karena ada penolakan keberadaan TPA oleh warga diberbagai daerah yang berdekatan.

Masalah penyediaan air bersih, khususnya yang berkaitan dengan perolehan sumber air baku yang debitnya semakin menurun dan masih sebagian besar berlokasi di luar Kota Bandung. Demikian juga mengenai tuntutan pengelolaan limbah cair yang lebih baik, terutama limbah industri, karena mencemari bagian hilir yang merupakan wilayah Kabupaten Bandung.

Peningkatan pelayanan transportasi khususnya lalu-lintas yang masuk dan keluar Kota Bandung, hal ini berkenaan dengan dibukanya jalan tol Cipularang, pengaturan rute angkutan bus dan angkutan kota, serta pengaturan terminal tipe B di batas kota.

Banjir di wilayah Bandung Barat merupakan banjir kiriman karena rusaknya kawasan konservasi di utara Bandung serta dimensi saluran kurang sesuai dengan semakin meluas dan padatnya kawasan terbangun. Sedangkan banjir di wilayah Bandung timur karena belum tuntasnya penanganan banjir daerah hulu Citarum yang secara administratif masuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, disamping wilayahnya cukup rendah, hal ini juga disebabkan dimensi saluran yang belum memadai.

Tekanan berbagai aktivitas penduduk dalam berbagai aspek mengakibatkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan yang cepat yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan, pemanfaatan Penggunaan ruang publik yang tidak sebagaimana mestinya (Keberadaan sektor informal pada koridor jalan dan Ruang Terbuka Hijau).

Kelengkapan infrastruktur perkotaan di Bandung Barat berdampak pada masih terpusatnya berbagai aktivitas perkotaan di wilayah ini, menuntut adanya pengembangan pusat primer gedebage guna meringankan beban di pusat kota, sekaligus mendorong penyebaran pembangunan ke arah Bandung Timur.

Pelayanan aparatur yang mencakup pengadministrasian penduduk dan berbagai aspek perijinan masih perlu ditingkatkan, demikian juga mengenai Penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh masih rendah.

Isu strategis lainnya adalah Rendahnya daya beli masyarakat, yang dapat dilihat dari jumlah keluarga miskin mencapai 82.396 KK/312.799 jiwa (BKB 2003) dan indeks daya beli sebagai salah satu komponen pendukung IPM dari aspek ekonomi, belum mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu hanya sebesar 0,40, dari 62,95 pada tahun 2003 menjadi 63,35 pada tahun 2004, sedangkan dalam

kesepakatan antara gubernur dengan para bupati/walikota se-Jawa Barat, dalam mendukung pencapaian IPM Jawa Barat, indeks daya beli Kota Bandung pada tahun 2004 di targetkan sebesar 64,9 %. Jadi indeks daya beli Kota Bandung masih dibawah harapan / target IPM Jawa Barat. Indeks daya beli tersebut setara dengan standar hidup layak atas dasar Purchasing Power Parity (PPP) yaitu sebesar Rp 573.154, nilai tersebut masih dibawah nilai konsumsi perkapita secara nasional untuk kota-kota besar, mencapai Rp 732.720. Dampak lain dari rendahnya daya beli tersebut adalah terhadap belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

Isu-isu strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai aspek permasalahan kota sebagai berikut :

#### 1. Aspek SDM

Titik sentral dari pelaksanaan pembangunan adalah manusia sehingga diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, oleh karena itu dimensi pembangunan manusia senantiasa menjadi prioritas utama, melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi.

Model pembangunan manusia yang dapat mewujudkan manusia berkualitas, yaitu manusia yang memiliki 3 (tiga) ciri, pertama : sehat dan berumur panjang, kedua : cerdas, kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa terhadap Tuhan YME,

pencapaian IPM pada tahun 2004 sebesar 77,17 meningkat sebesar 0,02 dari tahun 2003 yang mencapai 77,15. Peningkatan IPM tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai dari masing komponen pendukung IPM yaitu dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli. Aspek daya beli akan diuraikan pada aspek ekonomi, secara terinci aspek kesehatan dan aspek pendidikan diuraikan sebagai berikut :

*Aspek Kesehatan*, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) yang setiap tahunnya meningkat sebesar 0,02 tahun pada tahun 2004 menjadi 72,54 dari tahun 2003 yang mencapai 72,52 tahun, yang berdampak terhadap peningkatan Indeks Peluang Hidup sebesar 0,03 pada tahun 2004, menjadi 79,23 dari tahun 2003 yang mencapai 79,20.

*Aspek Pendidikan*, diukur melalui Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH Kota Bandung pada tahun 2004 menurun sebesar 0,53 menjadi 99,01 dari tahun 2003 yang mencapai 99,54, salah satu faktor yang cukup signifikan mempengaruhi penurunan tersebut adalah tingginya tingkat migrasi yang tidak disertai dengan kualitas pendidikan yang memadai. Sedangkan RLS pada tahun 2004 tidak mengalami perubahan dari tahun 2003 yang mencapai 10,32 tahun.

Secara umum penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan

jumlah partisipan sekolah yang terdapat di Kota Bandung. APK untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Bandung telah menunjukkan angka yang membanggakan yaitu 127,86% ditahun 2003/2004 dan pada tahun ajaran 2004/2005, meningkat menjadi 138,41%. APK untuk jenjang SMP/ sederajat untuk tahun ajaran 2003/2004 sebesar 100,75% sedangkan ditahun ajaran 2004/2005 menjadi 106,85%.

Namun untuk jenjang pendidikan menengah menunjukkan angka yang masih perlu ditingkatkan, capaian aspek SMA/MA/SMK tahun ajaran 2003/2004 baru mencapai 81,83% sementara pencapaian APM sebesar 58,2%. Berdasarkan data tersebut nilai APK lebih besar dari nilai APM, hal ini disebabkan oleh terdapatnya siswa yang mengikuti pendidikan di Kota Bandung tetapi bukan warga Bandung.

Sejalan dengan program yang saat ini digulirkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yaitu program akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pemerintah Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat berupaya menempatkan diri paling depan diantara Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat sehingga disamping melaksanakan program akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (9 tahun) mulai tahun 2005 telah mulai dilaksanakan program Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah dengan harapan bahwa pada tahun 2008 masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat

pendidikan sekurang-kurangnya setingkat sekolah menengah (SLTA).

Dari gambaran keadaan pendidikan Kota Bandung meskipun secara umum menunjukkan adanya peningkatan pencapaian APK, APM. Namun angka-angka ini masih belum memenuhi target yang diharapkan karena masih terdapat angka prosentase penduduk usia sekolah 7 – 18 tahun yang tidak berada di sekolah (Non Scholling Gap) masih terdapat angka putus sekolah (Drop Out), hal ini terindikasikan dari nilai rata-rata lama sekolah di kota Bandung untuk tahun 2004 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2003 yang mencapai 10,32 Tahun.

Faktor – faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pendidikan di Kota Bandung adalah:

1. Faktor ekonomi sebagian orang tua belum dapat mendukung secara optimal bagi kelangsungan pendidikan putra-putrinya, hal ini berarti aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pendidikan masih rendah;
2. Masih rendahnya infrastruktur pendidikan belum meratanya keberadaan pendidikan disetiap kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas;
3. Keberadaan tenaga pendidik/guru belum optimal dalam memenuhi kebutuhan, kendala yang terjadi seperti kurangnya tenaga pendidik/guru baik kuantitas maupun

kualitasnya, penyebaran tenaga pendidik/guru belum merata dan masih ada tenaga pendidik/guru yang tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan;

4. Dukungan masyarakat dan dunia kerja/dunia industri, masih perlu ditingkatkan terutama pentingnya pendidikan bagi kehidupannya, karena masih ada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang mempekerjakan anak usia sekolah, upah kerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan serta pembangunan kawasan industri yang kurang memperhatikan perkembangan dunia pendidikan;
5. Peran SKPD terkait serta lembaga/organisasi/kelompok masyarakat terhadap pendidikan belum terorganisir secara optimal.
6. Belum optimalnya masyarakat melaksanakan pola hidup sehat, yang antara lain diindikasikan dengan :
  - Masih relatif tingginya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan
  - Masih tingginya angka kesakitan karena diare dan kejadian luar biasa yang disebabkan vektor penyakit menular.
  - Adanya kecenderungan gejala *Emerging Diseases* ( yang baru muncul), seperti HIV/AIDs di Kota Bandung yang perlu diwaspadai dan disikapi.

- *Re-Emerging Diseases* (munculnya kembali penyakit), seperti TBC, yang rata-rata menyerang Keluarga tidak/kurang mampu.
- Munculnya kecenderungan penyakit degeneratif karena perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan seperti : jantung koroner, darah tinggi dll.

## 2. Aspek Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, berkembang cukup signifikan yaitu dari 7,31 % pada tahun 2003 menjadi 7,47 % pada tahun 2004 (Data BPS sangat sementara), kondisi tersebut sudah berada di atas LPE Propinsi Jawa Barat yaitu 4,50 % pada tahun 2003 menjadi 5,06 % pada tahun 2004. PDRB perkapita kota Bandung atas dasar harga konstan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.772.605 menjadi Rp 12.282.595 dari tahun 2003 yang mencapai Rp 10.509.990. Berdasarkan kriteria Bank Dunia angka pemerataan pendapatan di Kota Bandung baru mencapai 13,34 %, yang berarti bahwa 40 % penduduk (893.050 jiwa) berpenghasilan rendah menerima pendapatan rata-rata perkapita per tahun sebesar 13,44 % dari seluruh PDRB Kota Bandung yang mencapai Rp 19.402.859.000.000,-,

maka sejumlah 893.050 jiwa hanya menikmati sebesar Rp. 2.898.318,-. Sementara sejumlah 40 % (893.050 jiwa) menerima 26,47 % dari total PDRB atau menerima sebesar Rp 5.751.006,- sedangkan 20 % penduduk (446.525 jiwa) berpenghasilan tinggi menikmati sebesar 61,19 % dari total PDRB atau menerima pendapatan rata-rata perjiwa pertahun sebesar Rp 26.154.383, dengan demikian masih terjadi disparitas dalam distribusi pendapatan Kota Bandung.

Kontribusi sektor yang cukup besar terhadap PDRB kota Bandung berasal dari sektor jasa yang disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor prasarana (*utiliy*). Usaha-usaha tersebut sebagian besar dilaksanakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan seyogyanya harus mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi kota Bandung, tetapi permasalahan yang dihadapi saat ini adalah **belum terbangunnya sinergitas pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) dalam berbagai aspek**. Pemberdayaan KUMKM masih bersifat parsial/sektoral, sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja, sehingga hasil yang diperoleh belum

optimal. Jumlah koperasi di Kota Bandung mencapai 2.801 unit dengan jumlah UMKM sebanyak 73.027 unit. Bila dilihat dari kegiatan usahanya maka KUMKM telah menyentuh hampir seluruh bidang perekonomian dimasyarakat, meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, keuangan dan lain-lain.

Perkembangan Ekonomi Kota Bandung tidak terlepas dari jumlah investasi yang masuk, karena hal ini mempunyai efek ganda yang cukup besar apabila investasi tsb dilakukan pada sektor riil atau manufaktur. Pada tahun 2004 kenaikan investasi di kota Bandung relatif kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada umumnya investasi tersebut dilakukan pada sektor proverty sehingga efek ganda yang ditimbulkan relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh upaya peningkatan investasi PMD dan PMA belum optimal terutama mencakup pelayanan perijinan yang masih memerlukan evaluasi, hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap **Rendahnya Daya Saing Kota Bandung**.

Berdasarkan penilaian Komite Pemantau Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dituangkan dalam Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2004, Kota Bandung tidak mendapat penghargaan sebagai kota yang mempunyai daya tarik untuk berinvestasi baik dari kategori umum maupun

berdasarkan faktor sebagai berikut (Range Penilaian terbaik s/d terburuk adalah AAA s/d E) :

1. Faktor Kelembagaan adalah faktor yang secara langsung dibawah kendali pemerintah daerah (policy variabel), yang dapat mempengaruhi penetapan arah kebijakan pembangunan serta keberhasilan dalam membentuk iklim yg kondusif bagi investor, salah satunya dapat dilihat dari bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada publik. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **mengalami penurunan penilaian**, dimana pada tahun 2003 memperoleh Kategori BB, menjadi D Pada Tahun 2004.
2. Faktor Sosial Politik merupakan prasyarat mutlak untuk daya tarik investasi suatu daerah karena suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat dan kondisi politik yang kondusif. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **tidak mengalami perubahan penilaian**, tetap pada kategori C. Kondisi tersebut masih jauh dari harapan, sehingga perlu dievaluasi.
3. Faktor Ekonomi Daerah adalah indikasi dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Kedua aspek tersebut harus berjalan selaras agar tercipta

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan struktur ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya beli dan sikap mental yang mendorong kearah kemajuan dan modern. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **mengalami peningkatan penilaian** dari kategori BB menjadi AAA, hal ini didukung oleh pencapaian PDRB dan IPM yang meningkat dari tahun ketahun.

4. Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas adalah merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan penting dalam faktor produksi yaitu sebagai motor penggerak disamping kapital dan input produksi. Dari Ketiga variabel yang tergabung tersebut terlihat bahwa variabel tenaga kerja dan produktivitas memiliki bobot yang besar dalam pertimbangan keputusan berinvestasi. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung **tidak mengalami perubahan penilaian**, tetap pada kategori C.
5. Faktor Infrastruktur Fisik yang mencakup ketersediaan dan kualitasnya merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Semakin besar skala usaha maka semakin besar pula kebutuhan infrastruktur fisik. Dari hasil pemeriksaan berdasarkan faktor infrastruktur fisik terlihat bahwa daerah-daerah yang berada di pusat pertumbuhan dan yang termasuk dalam

wilayah metropolitan atau daerah penyangga kota-kota besar mempunyai nilai peringkat atas. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung *mengalami peningkatan penilaian* dari BB menjadi AA.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Bandung yang tercermin dalam PDRB dan LPE yang meningkat dari tahun ketahun tidak didukung oleh sektor riil tetapi didorong oleh konsumsi masyarakat sehingga peningkatan PDRB dan LPE tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang cukup potensial dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada PDRB Kota Bandung dengan laju pertumbuhan meningkat dari tahun 2002 sebesar 5,13% menjadi 7% pada tahun 2003 (BPS angka sementara). Disamping itu juga sektor pariwisata merupakan salah satu sumber PAD dengan kontribusi mencapai 35% terhadap PAD Kota Bandung pada tahun 2004. Walaupun demikian sampai saat ini penggalan PAD dari sektor ini dinilai belum optimal, hal ini disebabkan *belum tersedianya arah pengembangan pariwisata yang jelas yang sesuai dengan karakteristik kota Bandung*, sehingga target dari sektor ini belum dapat terprediksi dengan pasti/akurat.

Keadaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pelayanan sektor

lain (a.l. Aksesibilitas, keamanan, kenyamanan) karena pariwisata bukan merupakan sektor mandiri tapi keterkaitan dengan sektor lain sangat erat.

Kota Bandung dengan berbagai macam peran yang diembannya terutama sebagai pusat kolektif distributif barang dan jasa, sebagai pusat konsumsi, menuntut pemerintah kota berkewajiban menyediakan pangan dengan kuantitas dan kualitas produk sesuai kebutuhan dan kepercayaan masyarakat yang dianut, sesuai dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandung dalam berbagai aspek, tuntutan *pengawasan terhadap mutu produk pangan yang beredar di Kota Bandung belum dapat dilaksanakan secara optimal.*

### 3. Aspek Sosial Budaya

- a. Masih tingginya jumlah pengangguran pada tahun 2004 mencapai 85.000 orang dengan jumlah pencari kerja mencapai 42.275 orang dikarenakan rendahnya kualitas dan produktivitas angkatan kerja lokal serta terbatasnya lapangan pekerjaan
- b. Rendahnya produktivitas dan daya saing potensi tenaga kerja dari Angkatan Kerja Lokal

- c. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Sosial (Gelandangan, pengemis dan Anak jalanan)
- d. Belum optimalnya penanganan administrasi kependudukan
- e. Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas, peredaran nafza dan miras serta PSK dan perjudian
- f. Belum optimalnya peningkatan prestasi olah raga dan kepemudaan

#### 4. Aspek Penataan Kota

- a. Belum siapnya sarana dan prasarana fisik kota guna mendukung kedudukan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi yang merupakan Pusat jasa yang juga harus menampung beberapa aktivitas masyarakat dari luar Bandung, terutama setelah dibukanya Jalan Tol Cipularang. Ketidaksiapan sarana dan prasarana fisik kota, terutama jalan menyebabkan kondisi kemacetan yang semakin parah.
- b. Perlunya kesinambungan dan pematapan penataan kota Pasca pelaksanaan Konfrensi Asia Afrika, khususnya dalam rangka mempertahankan kondisi kota yang sudah tertata di 7 titik dan daerah-daerah yang jadi perhatian, termasuk taman dan elemen estetika kota, serta

memperluas wilayah penataan termasuk penyediaan ruang terbuka hijau, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

- c. Masih belum konsistennya aspek penegakan hukum bagi pelanggar K-3 yang menyebabkan kesemrawutan kota, terutama di pusat kota khususnya di 7 titik keramaian.
- d. Terbatasnya ketersediaan air baku sebagai akibat tekanan pertambahan penduduk dan penurunan debit sumber air karena tingginya *run off* air hujan yang tidak diimbangi upaya-upaya konservasi yang melibatkan peran serta segenap lapisan masyarakat. Pada saat ini cakupan pelayanan air bersih baru mencapai lk. 53 % dari total populasi dengan pelayanan 60 liter/orang/hari. Disamping itu masih ada tingkat kebocoran yang cukup tinggi.
- e. Terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah, termasuk peralatan dan kurangnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, serta mahalrnya teknologi pengolahan sampah. Pada saat ini cakupan pelayanan pengangkutan sampah baru mencapai lk. 69 % dari total wilayah. Cakupan pelayanan sampah ini menjadi sangat menurun ketika TPA Leuwigajah tidak dapat dipergunakan dan belum ada TPA pengganti.

- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, termasuk kebiasaan membuang sampah di badan sungai dan perairan, hal ini diperburuk dengan semakin tingginya volume sampah yang dihasilkan warga Kota Bandung maupun pendatang. Di samping itu belum memadainya kesadaran masyarakat untuk mengurangi volume sampah dengan pemilahan sampah organik dan non organik.
- g. Menurunnya kondisi sanitasi lingkungan karena keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan permukiman terutama di kawasan padat penduduk. Kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik tersebut dapat mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
- h. Menurunnya kualitas lingkungan terutama pada kawasan dengan konsentrasi kegiatan tinggi. Penurunan kualitas lingkungan ini dapat ditunjukkan dengan hasil pengukuran kualitas udara yang pada beberapa lokasi yang dipantau telah melebihi ambang batas.
- i. Belum meratanya pelayanan infrastruktur kota terutama di wilayah Bandung Timur menyebabkan masih terkonsentrasinya aktivitas di wilayah Bandung Barat.

#### 5. Aspek Pemerintahan Kota

- a. Sangat cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan yang memayungi pelaksanaan tugas pokok

- dan fungsi perangkat daerah khususnya peraturan mengenai kelembagaan dan ketatalaksanaan yang merupakan pedoman sistem kerja dan tatalaksana perangkat daerah.
- b. Belum optimalnya upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Belum terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah
- d. Terbatasnya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.
- e. Belum proporsionalnya penyebaran pegawai terutama pada kecamatan dan kelurahan yang menyebabkan kurangnya personil di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
- f. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada beberapa unit kerja.
- g. Masih adanya **debirokratisasi** dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi maupun sebagai

akibat kurang efektifnya kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah.

- h. Belum efektifnya sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam upaya peningkatan kualitas kemampuan aparatur.

6. Aspek Keuangan Kota

- a. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- b. Belum terwujudnya akuntabilitas pengelolaan kota yang melibatkan fungsi kontrol sosial masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran dunia usaha swasta dalam pembangunan.
- Menurunnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan
  - Belum optimalnya peningkatan kinerja apratur,
  - Belum terwujudnya sinergitas hubungan kerjasama antar daerah
  - Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber pembiayaan keuangan kota.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA**  
**EKONOMI DAERAH**

**3.1. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2004**

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat memiliki kedudukan khusus didalam eksistensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah propinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai Kota Koleksi dan Distribusi Barang (Perdagangan), Kota Pelayanan Jasa (Jasa Keuangan, Jasa Hukum, Jasa Konstruksi, Jasa Perencanaan, Jasa Manajemen, Jasa Pariwisata), Kota Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta), Kota Iptek (Batan, LEN, Pindad, Telkom, PT DI, PT Inti).

Sehubungan dengan peran tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian juga jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pencapaiannya sudah diatas rata-rata mencapai 7,47 pada tahun 2004. Selain LPE , ada juga beberapa indikator makro lainnya yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah indikator makro pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
Perkembangan Indikator Makro

No	Indikator	Satuan	Kota Bandung		Propinsi Jawa Barat	
			2003	2004	2003	2004
1	PDRB (ADHK)	(Juta Rp)	18.051.111	19.399.476	176.361.742	185.144.556
2	LPE	%	7,31	7,47	4,39	4,98
3	PDRB/Kapita	(Rp/Thn)	8.100.960	8.535.827	6.425.243	6.895.834
4	Inflasi	%	5,69	5,69	5,69	5,69
5	Investasi	(Juta Rp)	1.244.726	2.197.214	36.508.498	40.523.595
6	Pengangguran Terbuka	%	20,41	20,87	9,24	9,46

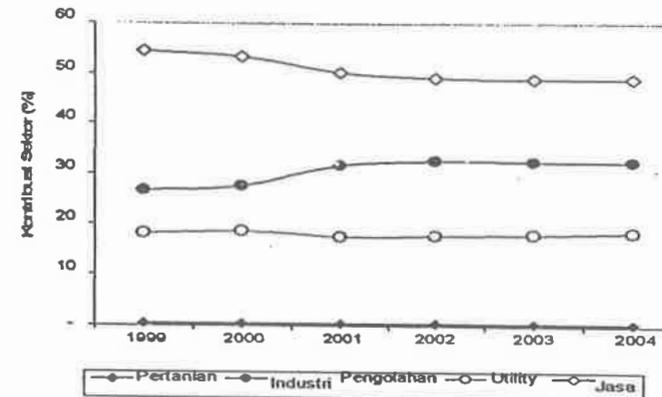
Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000 – 2004

Sumber : BPS (Diolah)

Salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian adalah mengamati perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dilihat berdasarkan kontribusi sektor-sektor dalam perekonomian.

Selama kurun waktu 1999-2004, sektor jasa rata-rata memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian kota Bandung, yaitu 50,9%. Berikutnya adalah sektor industri pengolahan, sebesar 30,6%, disusul sektor prasarana (utility)

sebesar 18,1% dan sisanya sebesar 0,39% adalah sektor pertanian.



**Gambar 1**  
Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Kota Bandung Tahun 1999-2004 (%)

Apabila diperhatikan perkembangan kontribusi sektor-sektor dalam perekonomian kota Bandung dari tahun 1999-2004, maka nampak sektor jasa sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar, walaupun kontribusinya semakin menurun dalam perekonomian, sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan pesat. Sektor prasarana (utility) kontribusinya cenderung stabil.

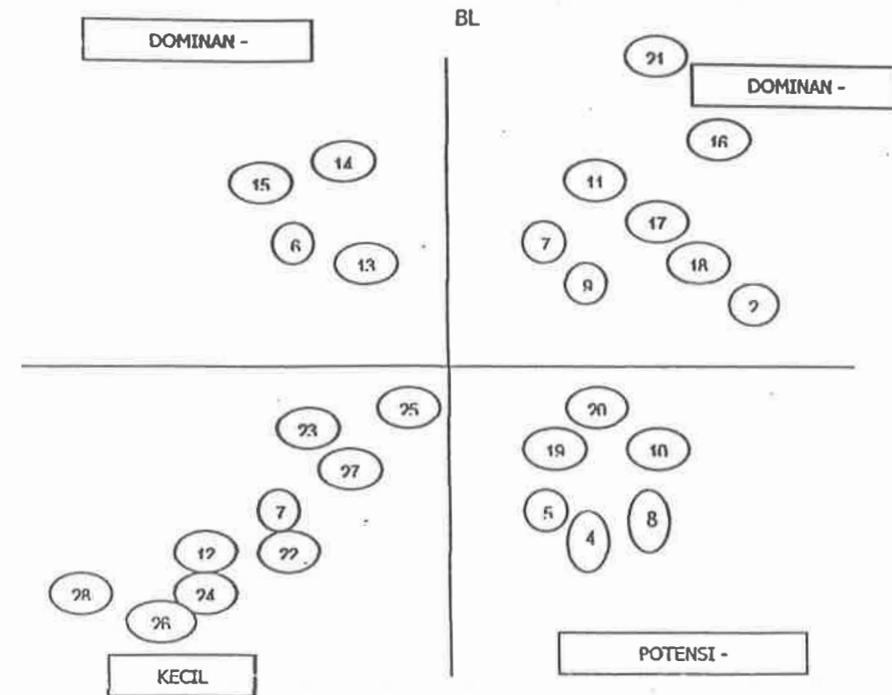
Secara faktual peran sektor industri pengolahan terus meningkat sedangkan peran sektor jasa terus menurun. Untuk

satu Kota yang berpenduduk padat potensi tekanan lingkungan dari proses produksi pada sektor industri perlu dicermati, mengingat daya dukung lingkungan kota Bandung semakin menurun. Oleh karena itu pada masa yang akan datang kebijakan pembangunan harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa.

Sektor-sektor tersebut melalui analisis tabel Input Output dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran berikut;

- Sektor Dominan-Unggul;** apabila nilai indek derajat kepekaan dan derajat penyebaran diatas 1;
- Sektor Dominan-Menurun,** apabila nilai indek derajat kepekaan diatas 1 dan nilai indek derajat penyebaran kurang dari 1;
- Sektor Potensial berkembang,** apabila nilai indek derajat kepekaan kurang dari 1 dan nilai indek derajat penyebaran diatas 1;
- Sektor Kecil;** apabila nilai indek derajat kepekaan dan derajat penyebaran kurang dari 1;

Pengelompokan sektor-sektor tersebut dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Sumber: BPS (Data diolah)

**Gambar 2**  
 Pemetaan Sektor-sektor berdasarkan Analisis Derajat Kepekaan dan Derajat Penyebaran (*Backward dan Forward Linkages*)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pengelompokan Sektor Dominan - Unggul terdiri dari :

- Sektor Industri Barang dari Logam, Mesin dan peralatannya (Sektor 9)

2. Sektor Penginapan (sektor 16)
3. Sektor Komunikasi (Sektor 21)
4. Sektor Restoran (Sektor 17)
5. Sektor Industri Makanan (Sektor 2)
6. Sektor Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (sektor 3)
7. Sektor Angkutan Darat (sektor 18)
8. Sektor Listrik (sektor 11)

Sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran 1 tersebut (Dominan Unggul) mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan di Kota Bandung, dimana ada kecenderungan pada kota-kota yang semakin meluas baik secara fungsional maupun administratif akan semakin memerlukan mobilitas yang tinggi sebagai ciri dari dinamika kehidupan Kota metropolitan yang didukung oleh perkembangan sektor Komunikasi, Angkutan Darat, Restoran, dan Penginapan serta sektor industri. Oleh karena itu pemerintah kota perlu mendorong peningkatan kinerja dari sektor-sektor tersebut melalui kebijakan yang tepat dan terarah agar dapat memberikan dampak ganda yang cukup besar.

Sementara pengelompokan Sektor Dominan – Menurun terdiri dari :

1. Sektor Perdagangan Besar (Sektor 14)
2. Sektor Perdagangan Eceran (Sektor 15)
3. Sektor Konstruksi (Sektor 13)
4. Sektor Industri Kimia dan Barang-barang dari kimia, karet & plastik (sektor 6)

Sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran 2 tersebut (Dominan Menurun), kontribusi terhadap perekonomian kota sudah mencapai titik optimum yang mengarah pada penurunan kinerja dari sektor tersebut, sehingga apabila dikembangkan tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kota Bandung sehingga dapat menimbulkan dampak eksternalitas negatif terhadap perkembangan Kota Bandung. Untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah kota sebaiknya mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor tersebut melalui kebijakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Pengelompokan Sektor Potensi Berkembang terdiri dari :

1. Sektor Industri Logam Dasar (Sektor 8)
2. Sektor Angkutan Udara (Sektor 19)
3. Sektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan (Sektor 5)
4. Sektor Jasa Penunjang Angkutan (Sektor 20)
5. Sektor Industri Pengolahan Lainnya (Sektor 10)
6. Sektor Industri Kayu, Bambu, Rotan dan sejenisnya (sektor 4).

Sektor-sektor yang termasuk ke dalam kuadran Potensi Berkembang mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui proses produksi dalam rangka mewujudkan produk yang berdaya saing tinggi melalui kebijakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasiskan potensi daerah.

Pengelompokan Sektor yang tergolong Kecil adalah :

1. Sektor Pertanian (Sektor 1)
2. Sektor Air Bersih (Sektor 12)
3. Sektor Jasa Perusahaan (Sektor 24)
4. Sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan (Sektor 26)
5. Sektor Keuangan (Sektor 22)
6. Sektor Barang Galian Bukan Logam (Sektor 7)
7. Sektor Jasa Hiburan (Sektor 27)
8. Sektor Sewa Bangunan (Sektor 23)
9. Sektor Jasa Pemerintahan dan Pertahanan (sektor 25)
10. Sektor Lainnya (Sektor 28)

Sektor-sektor yang termasuk ke dalam kuadran 4 tersebut mempunyai kontribusi yang kecil dalam mendukung struktur perekonomian kota.

Berdasarkan kriteria tersebut dengan asumsi perekonomian berjalan secara alami, maka sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran Dominan – Unggul dan Potensi Berkembang diharapkan dapat mewujudkan proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung pada tahun 2006 sebesar 7,62 hingga 7,76, dan

*RKPD Kota Bandung Tahun 2006* III - 8

laju inflasi mencapai 8%. Dalam rangka mendorong pertumbuhan tersebut diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

### 3.2. PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2006 DAN PENCAPAIANNYA

#### 3.2.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor riil), kebijakan moneter serta situasi dan kondisi umum. Disamping itu perkembangan daerah sekitar juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Sehubungan dengan kompleksnya faktor-faktor tersebut maka relatif banyak hal yang menjadikan rumit dalam penyusunan model perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dalam perkiraan ekonomi Kota Bandung digunakan model aplikatif, sederhana namun tetap memiliki daya prediksi yang relatif memadai.

Trend pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan perhitungan PDRB (harga konstan) pertumbuhan ekonomi kota Bandung pada tahun 2006 diperkirakan mencapai 7,62% dalam kondisi normal, sedangkan berdasarkan skenario optimis angka tersebut diperkirakan mencapai 7,76%, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

*RKPD Kota Bandung Tahun 2006*

III - 9

**Tabel. 3**  
Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2006

Tahun	Normal	Optimis
2000	5,41	5,41
2001	7,54	7,54
2002	7,13	7,13
2003	7,31	7,31
2004	7,47	7,47
2005	7,54	7,61
2006	7,62	7,76

**Tabel. 4**  
Perkiraan PDRB Kota Bandung Tahun 2005-2006 (harga konstan 2003) ( dalam juta rupiah)

Tahun	Normal	Optimis
2000	18.732.422	18.732.422
2001	20.458.341	20.458.341
2002	21.854.641	21.854.641
2003	23.420.125	23.420.125
2004	25.169.540	25.169.540
2005	27.066.973	27.084.210
2006	29.128.205	29.186.078

### 3.2.2. Perkiraan Kebutuhan Investasi.

Investasi memiliki peran yang penting dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Berdasarkan pada perkiraan laju RKPd Kota Bandung Tahun 2006

III - 10

pertumbuhan ekonomi yang telah disebutkan, serta data ICOR (incremental capital output ratio) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 1998 - 2000, maka dapat diketahui perkiraan kebutuhan investasi tahun 2006. Perkiraan ini didasarkan pada kondisi tidak adanya peningkatan atau perbaikan teknologi. Dengan demikian apabila pada masa tersebut sektor produksi terus melakukan inovasi atau menggunakan teknologi yang lebih baik, maka tingkat investasi tersebut akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi normal, perkiraan kebutuhan investasi pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 6.224.922.000.000,- sedangkan skenario optimis, angka tersebut menjadi Rp. 6.347.640.000.000,-

### 3.2.3. Perkiraan Serapan Tenaga Kerja

Perkiraan serapan tenaga kerja didasarkan pada kerangka pikir bahwa, semakin meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, maka diharapkan serapan tenaga kerja juga akan meningkat.

Perkiraan jumlah serapan tenaga kerja diperoleh dengan melihat data urut waktu (*time series*) sampai dengan tahun 2003 berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan cara melihat elastisitas (*respon*) serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi akan menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi pula. Perkiraan serapan tenaga kerja dengan memperhatikan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5**  
Perkiraan Jumlah Serapan dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun 2005 - 2006

Tahun	Pertumbuhan Tenaga Kerja			
	Normal	%	Optimis	%
2005	926.857	6,13	927.343	6,18
2006	984.215	6,19	985.825	6,31

Berdasarkan kondisi normal, perkiraan serapan tenaga kerja dalam rangka pencapaian LPE tahun 2006 secara akumulatif mencapai 984.215 orang, sedangkan berdasarkan skenario optimis, angka tersebut mencapai 985.825 orang.

### 3.2.4. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan secara sederhana melalui proporsi Anggaran terhadap PDRB khusus diperhitungkan pada masa otonomi daerah. Angka yang dipergunakan adalah angka rata-rata.

Perkiraan kebutuhan APBD Kota Bandung tahun 2006 dibuat dalam harga berlaku dengan asumsi inflasi 8 %, adalah sebesar Rp 1,465 M.

### 3.2.5. Perkiraan Pendapatan Penduduk

Perkiraan pendapatan perkapita penduduk dihitung atas dasar harga berlaku baik dalam mata uang rupiah dan dalam US Dollar.

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan adalah:

- Perilaku ekonomi Kota Bandung tidak mengalami perkembangan secara drastis dalam tahun 2006 dan tidak ada kebijakan mendasar yang mempengaruhinya.
- Laju inflasi tahun 2006 diperkirakan sekitar 8% pertahun.
- Kurs Rp/USD diperkirakan Rp.9.100,-.
- Distribusi pendapatan antara 40% penduduk berpendapatan terendah dan 60% penduduk berpendapatan tertinggi relatif konstan.
- Pertumbuhan penduduk diasumsikan konstan.

Perkiraan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6**  
Perkiraan Jumlah PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2005-2006(dalam rupiah)

Tahun	PDRB/Kap (Rp)-Harga Berlaku	
	Normal	Optimis
2005	13.931.075	13.939.947
2006	16.115.583	16.147.602

Sumber : BPS (diolah)

Pendapatan perkapita yang dihitung atas dasar PDRB perkapita sebagaimana disampaikan sebelumnya, merupakan ukuran rata-rata yang relatif masih kasar. Berdasarkan ukuran pendapatan perkapita, kita tidak dapat melihat distribusi (pemertaan) dan disparitas (kesenjangan) pendapatan.

Untuk mengetahui distribusi dan disparitas pendapatan maka diperkirakan pula pendapatan rumah tangga perbulan dengan memanfaatkan data PDRB perkapita dan rasio Gini, sehingga diperoleh perkiraan rata-rata pendapatan perbulan untuk:

1. Penerimaan pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terbawah (rendah).
2. Penerimaan pendapatan dari 60% penduduk dengan pendapatan teratas (tinggi).

Menurut rasio gini tahun 2000, diperkirakan 40% penduduk menerima pendapatan sebesar 13,44% dari seluruh nilai perekonomian di Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 60% penduduk tahun 2000 menerima 86,56% dari seluruh nilai perekonomian di Kota Bandung. Rasio tersebut diasumsikan konstan sampai dengan tahun 2008. Hasil perkiraan yang diperoleh untuk tahun 2005 -2006 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7**  
Perkiraan Pendapatan Perkapita Perbulan  
Atas dasar 40% penduduk berpendapatan terbawah  
dan 60% penduduk berpendapatan teratas  
Tahun 2006 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan 40% Bawah		Pendapatan 60% Atas	
	Normal	Optimis	Normal	Optimis
2005	390.070	390.319	1.674.825	1.675.891
2006	451.236	452.133	1.937.451	1.941.301

Sumber : BPS (Diolah)

## BAB IV PEMBANGUNAN WILAYAH

Dalam perencanaan pembangunan, pendekatan wilayah merupakan alternatif lain dari pendekatan sektoral yang keduanya bisa saling melengkapi. Kelebihan pendekatan wilayah adalah menyerasikan pembangunan antar wilayah dan memadukan program dan kegiatan lintas sektor.

Sebagaimana dinyatakan didalam Perda No.02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung bahwa konsep pengembangan Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka konsep pengembangan Kota Bandung adalah melalui pengembangan dua pusat primer, yaitu upaya untuk mengubah struktur ruang dari monosentrik (satu pusat) menjadi duosentrik (dua pusat).

Selanjutnya untuk tujuan pemaduan lintas sektor diarahkan pada pengembangan kawasan khusus yang meliputi kawasan : Pusat primer Gedebage, koridor jalan arteri Pasteur-Cibiru, Tamansari, Punclut, Margasenang-Margacinta, Cagar Budaya, Tegallega, dan Agrowisata Ujung Berung.

#### 4.1 Pembangunan Wilayah Pengembangan

Secara geografis, dua pusat primer yang terletak pada wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur yang sinergis dengan pusat sekunder yang direncanakan akan memberikan pelayanan yang lebih menyebar sehingga mengurangi ketergantungan warga kota terhadap pusat primer lama (alun-alun). Pusat primer baru di wilayah Bandung Timur akan berperan menunjang eksistensi wilayah kota yang telah ada/berkembang, karena itu harus didukung oleh sistem transportasi yang andal untuk mobilitas ulang-alik antara pusat primer baru dengan pusat primer yang telah berkembang di wilayah Bandung Barat kota.

Adanya dua pusat primer ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah Timur agar perkembangan kota antara bagian Barat dan Timur dapat lebih merata. Pengembangan Pusat Primer Gedebage juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Inti Pusat Kota (alun-alun).

Selanjutnya konsep ini ditindaklanjuti dengan suatu Kebijakan Utama Struktur Tata Ruang yaitu:

1. Mengembangkan 2 (dua) pusat primer untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;
2. Membagi wilayah kota menjadi 6 (enam) wilayah pengembangan (WP), masing-masing dilayani oleh satu Pusat Sekunder;

3. Mengembangkan pusat sub-WP dan pusat-pusat lingkungan secara merata dengan pembagian jenjang pelayanan di dalam setiap WP;
4. Menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder.

Pengembangan pusat-pusat sekunder pada setiap Wilayah Pengembangan berfungsi sebagai penyangga dua pusat primer dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota. Penyebaran pusat sekunder juga dimaksudkan untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarbagian wilayah kota.

Pusat Primer Inti Pusat Kota melayani Pusat Sekunder Setrasari, Sadang Serang, Kopo Kencana, dan Turangga. Kebijakan dasar pengembangannya adalah *urban renewal*. Pusat Primer Gedebage melayani Pusat Sekunder Arcamanik dan Margasari. Kebijakan dasar pengembangannya adalah *urban redevelopment*.

Didalam Perda No.02 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung telah dinyatakan bahwa strategi pengembangan kota yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan 5 C Strategi; yaitu: *core strategy* (strategi utama), *consequency strategy* (strategi konsekuensi), *consumer strategy* (strategi pelanggan), *control strategy* (strategi pengendalian) dan *culture strategy* (strategi budaya).

1. Strategi utama (*core strategy*) dalam pengembangan kota adalah melakukan pengembangan ke arah wilayah Bandung

Timur dan peningkatan kualitas lingkungan di wilayah Bandung Barat.

2. Strategi konsekuensi (*consequency strategy*) dari strategi utama ini adalah melengkapi prasarana dan sarana pendukung di wilayah Bandung Timur dan mengembangkan kemitraan dengan swasta;
3. Strategi pelanggan (*consumer strategy*) adalah dengan memberikan insentif untuk pembangunan wilayah Bandung Timur;
4. Strategi pengendalian (*control strategy*) dilakukan dengan membatasi pengembangan dan menerapkan perangkat disinsentif di wilayah Bandung Barat serta peningkatan kualitas lingkungan;
5. Strategi budaya (*culture strategy*) digunakan untuk masalah pemanfaatan ruang publik yang dilakukan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat dan dalam memanfaatkan ruang publik, ketaatan terhadap hukum dan peraturan, dan mendahului kewajiban daripada hak.

#### **4.2. Pengembangan Kawasan Khusus**

##### **4.2.1. Pengembangan Kawasan Pusat Primer Gedebage**

Pengembangan Kawasan Bandung Timur menjadi salah satu program strategis pembangunan Pemerintah Kota Bandung pada masa mendatang. Visi pengembangan Kawasan Gedebage telah dirumuskan oleh pemerintah kota, yang pada prinsip dikembangkan untuk mengurangi beban aktivitas dan lalu lintas di

pusat Kota Bandung yang sudah mencapai kapasitas maksimal. Kawasan khusus telah disiapkan, dan pada masa mendatang diharapkan menjadi kawasan yang berkelanjutan sebagai penggerak perkembangan dengan tingkat kualitas hidup tinggi sekaligus memiliki magnet investasi yang menarik. Kawasan ini akan dikembangkan secara terpadu dilengkapi berbagai fasilitas bisnis, sosial, rekreasi dan olah raga.

Tujuan pengembangan pusat primer Gedebage adalah menciptakan kawasan pusat pengembangan Gedebage sebagai bagian terpadu dari Kota Bandung yang mandiri, berkualitas hidup tinggi, berkelanjutan (sesuai dengan daya dukung lingkungan), mampu menarik investasi dan mengurangi beban kegiatan dan lalu lintas di Kota Bandung Barat.

Batas kawasan pengembangan Pusat Primer Gedebage adalah bagian Utara dibatasi oleh Jl. Soekarno Hatta, bagian selatan adalah Jalan Toll Padaleunyi, bagian Barat adalah Jalan Gedebage Larna dan bagian Timur dibatasi oleh Jalan Cimencrang, dengan luas ± 526.27 ha. Kawasan Pengembangan Pusat Primer Gedebage dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1

Batas-batas Kawasan Pengembangan Pusat Primer Gedebage

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Pengembangan Pusat Primer Gedebage adalah :

- a. Program pengembangan kawasan Gedebage
- b. Program penataan prasarana dan sarana kota
- c. Program peningkatan investasi kota
- d. Program pengamanan dan pendayagunaan asset Pemerintah Kota

Adapun indikasi kegiatan untuk mengembangkan Kawasan Gedebage adalah :

- a. Melakukan sosialisasi rencana pengembangan kawasan Gedebage;
- b. Melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembangan kawasan Gedebage.

#### 4.2.2. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Pasteur-Cibiru

Salah satu tujuan dari penyusunan rencana struktur tata ruang adalah untuk mewujudkan efektifitas sistem pelayanan. Struktur ruang Kota Bandung terdiri atas unsur-unsur pembagian wilayah pengembangan (WP), sistem pusat pelayanan, struktur kegiatan fungsional, dan struktur jaringan transportasi. Khusus untuk rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Bandung.

Untuk melengkapi hirarki sistem jaringan jalan, diupayakan peningkatan akses melalui rencana pengembangan jalan bebas hambatan dalam kota, diantaranya adalah rencana pengembangan Jalan Arteri Bebas Hambatan dari pintu Tol Pasteur lewat Jembatan PASUPATI terus berlanjut hingga ke arah Cibiru.

rencana untuk pengembangan Jalan Tol Pulau Jawa yang disusun oleh Direktorat Sistem Jaringan Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen PU telah dicantumkan rencana pengembangan Jalan Tol dalam Kota untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Sistem jaringan jalan tol tersebut terdiri dari 4 (empat) koridor, mencakup untuk arah Barat-Timur dan Utara-Selatan. Koridor Jalan Arteri Pasteur-Cibiru direncanakan akan dikembangkan sebagai Jalan Tol Dalam Kota dengan pertimbangan koridor ini merupakan akses tambahan selain jalan tol Padaleunyi. Pajang ruas rencana jalan tol ini mencapai  $\pm$  17 Km dan akan dihubungkan dengan koridor jalan tol Pasteur-Pasikoja-Soreang dan Ujung berung-Gedebage-Majalaya.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Koridor Jalan Arteri Pasteur-Surapati adalah :

- a. Program penataan prasarana dan sarana kota
- b. Program tata ruang dan penatagunaan tanah

Adapun Indikasi Kegiatan dalam rangka mengembangkan Kawasan Khusus Kawasan Koridor Jalan Pasteur-Cibiru adalah :

- a. Melakukan konsultasi rencana pengembangan Jalan Tol Pasteur-Cibiru;
- b. Melakukan penyusunan Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jalan Tol Pasteur-Cibiru;
- c. Melakukan penyusunan rencana tata ruang kawasan koridor Jalan Tol Pasteur-Cibiru;
- d. Penertiban kegiatan sepanjang koridor Jalan Pasteur-Cibiru.

#### 4.2.3. Pengembangan Kawasan Tamansari

Sebagai payung utama atau landasan utama yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung adalah Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Bandung 2004 - 20013. Dalam Bab IV, Pasal 10 dikatakan bahwa Kebijakan perencanaan tata ruang meliputi struktur tata ruang, pola pemanfaatan ruang, sistem transportasi serta prasarana dan sarana kota.

Kebijakan Pembangunan dan Penataan Kawasan Tamansari merupakan bagian dari Kebijakan utama pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, Ayat 2 © yaitu membatasi perkembangan perumahan, perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Barat serta penataan kawasan kumuh dengan pengembangan perumahan secara vertikal lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungannya.

Dengan melihat kondisi Kawasan Tamansari atau yang sering disebut sebagai "Lembah Cikapundung" yang sangat memprihatinkan (kumuh, tidak tertata dan mempunyai kepadatan penduduk tinggi) maka kawasan ini merupakan salah satu kantong konflik pemanfaatan ruang yang perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan Revitalisasi Kawasan melalui Pembangunan dan Penataan Kawasan yang berbasis lingkungan.

Dampak adanya pembangunan Jembatan Layang Pasupati (Pasteur-Surapati) yang melintas diatas Lembah Cikapundung

yang sekarang pengerjaannya sudah hampir selesai maka perlu segera dilakukan penataan fungsi pemanfaatan ruang/lahan dibawah koridor jembatan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai pemacu untuk penataan dan pembangunan kawasan disekitarnya.

Kawasan Tamansari yang terletak diantara ruas jalan Cihampelas di sebelah Barat dan Jalan Tamansari di sebelah Timur sering disebut sebagai Lembah Cikapundung karena dibagian tengah lembah ini mengalir Sungai Cikapundung yang membelah Kota Bandung dari arah Utara sampai Selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Secara administratif kawasan ini termasuk sebagai Kawasan Khusus di Wilayah Pengembangan Cibeunying yang merupakan skala prioritas dalam pengembangannya.

Gambaran kondisi Lembah Cikapundung sekarang ini sangat jauh berbeda dengan hasil perancangan Kota Bandung yang pernah disusun pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa tersebut, Lembah Cikapundung merupakan jalur hijau kota yang membentang dari lokasi kebon binatang sekarang sampai ke Jalan Wastukencana. Jalur hijau Lembah Cikapundung merupakan *City Garden* Bandung yang diapit oleh Jalan Cihampelas dan Jalan Tamansari dengan hiasan aliran Sungai Cikapundung dibagian tengahnya.

Untuk menikmati keindahan panorama Lembah Cikapundung ini Thomas Karsten telah merancang sebuah jalan *oustrada* yang melintasi Bandung bagian Utara. Suatu rancangan

yang sangat ideal karena keberadaan jalur hijau itu merupakan batas diantara dua inti pengembangan kota yaitu Kampus ITB dan Komplek Penelitian (Gedung Pasteur dan Rumah Sakit Hasan Sadikin)

Perubahan politik kemudian menyebabkan perubahan fungsi kawasan kota sehingga Lembah Cikapundung berubah menjadi kawasan perumahan. Sebagian tumbuh melalui perencanaan dan sebagian lagi tumbuh secara alamiah yang akhirnya menjadi perkampungan yang tidak teratur, hal ini terjadi sejak tahun 1960-an.

Munculnya pemukiman tersebut menyebabkan tumbuhnya fungsi-fungsi lain seperti Pasar Balubur, sarana pendidikan, perkantoran dan tempat peribadatan. Melengkapi prasarana permukiman telah dibangun pula struktur bagian kota seperti jalan lingkungan gang dan jalan setapak sebagai penghubung antara pemukiman yang tidak teratur. Pesatriya perubahan peruntukkan ruang tersebut akhirnya Lembah Cikapundung menjadikan salah satu kantong permasalahan konflik pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bandung.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlu kiranya dilakukan revitalisasi Kawasan Tamansari sebagai upaya mengembalikan citra Lembah Cikapundung yang diawali dengan pembangunan Jembatan Layang Pasupati, sehingga diharapkan ke depan Kawasan Tamansari ini dapat menjadi Landmarknya Kota Bandung.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Tamansari adalah :

- a. Program penataan prasarana dan sarana kota
- b. Program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan
- c. Program peningkatan investasi kota

Adapun Indikasi Kegiatan yang diusulkan dalam rangka Pengembangan Kawasan Khusus Tamansari melalui Penataan Kawasan Tamansari pada Tahun Anggaran 2006 adalah :

1. Penyusunan AMDAL Kawasan Tamansari
2. Penyusunan Detil Engineering Design (DED) Kawasan Tamansari
3. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Balubur
4. Pembangunan Rumah Susun
5. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendukung di Kawasan Tamansari

#### 4.2.4. Penataan Kawasan Punclut

Kawasan Punclut pada awalnya merupakan wilayah perkebunan teh Belanda, namun setelah era pendudukan Jepang. Seiring dengan perjalanan waktu, kawasan ini kemudian berubah menjadi perladangan rakyat .

Peralihan fungsi diatas memunculkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari: tingginya tingkat erosi dan sedimentasi, kondisi vegetasi yang sudah rusak dan gundul serta banyaknya bangunan secara sporadis yang sulit dikendalikan, serta status

kepemilikan lahan yang belum jelas dan sebagian besar dikuasai masyarakat dan pemilik lahan.

Bila permasalahan diatas dibiarkan terus menurus, dapat dipastikan kondisi lingkungan kawasan Punclut akan semakin memburuk dan dapat menimbulkan potensi bahaya erosi dan sedimentasi bagi daerah dibawahnya.

Konsep Penyelamatan Punclut yang Berpihak kepada Pelestarian Lingkungan :

- Penataan kawasan Punclut pada prinsipnya dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan kawasan tersebut dari daerah-daerah lainnya di wilayah Kota Bandung;
- Konsep penataan Kawasan Punclut didasari pada prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (*eco-development*) dengan penerapan aturan pengembangan yang ketat, yaitu penetapan luas kawasan lindung minimal 80% dan kawasan budidaya sebesar 20% dengan tetap mengutamakan fungsi lindungnya;
- Kegiatan penghijauan dengan berbasiskan "Ekonomi Kerakyatan" dengan mengembangkan konsep Agro Forestry (Hutan Tanaman Produktif) dengan alokasi 80% tanaman produktif dan 20% tanaman lindung

Sementara itu strategi yang Paling Tepat dalam rangka Penataan Kawasan Punclut adalah :

- Penataan kawasan Punclut didasari kepada prinsip-prinsip *reinventing Government* yang mengutamakan pemikiran

bahwa "Pemerintah sebaiknya tidak bertindak sebagai pelaku utama (*provider*), melainkan sebagai pendorong saja (*enabler*)" atau dikenal dengan konsep "*Steering rather than rowing*"

- Pertimbangan diatas didasari pemikiran bahwa apabila Pemerintah bertindak sebagai pelaku utama (*provider*) akan menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban untuk menyediakan dukungan pembiayaan yang selanjutnya dapat membebani APBD yang alokasinya terbatas;
- Oleh karena itu dalam strategi yang dipilih dalam operasionalisasi upaya penyelamatan Kawasan Pundut adalah strategi yang menempatkan Pemerintah Kota sebagai fasilitator dan regulator saja;

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Pundut adalah :

- a. Program tata ruang dan penatagunaan tanah
- b. Program pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup
- c. Program peningkatan kualitas pengawasan
- d. Program peningkatan penegakan hukum

Indikasi kegiatan untuk menyelamatkan dan menata Kawasan Pundut adalah :

- Kawasan Pundut mengindikasikan sebuah ekosistem yang sudah kritis, rusak berat dan gundul sehingga perlu penanganan cepat, khususnya melalui penghijauan;

- Konsep penyelamatan Kawasan Pundut disusun berdasarkan tuntutan/aspirasi warga Pundut melalui pelibatan masyarakat (*community involvement*) sehingga merupakan produk hasil kesepakatan bersama;
- Upaya penyelamatan Kawasan Pundut akan dibagi kepada 2 (dua) sasaran, yaitu:
  1. Untuk lahan yang dikuasai penduduk (lokasi konsolidasi lahan:67,8 Ha dan tanah milik adat seluas 131,8 Ha) dilakukan melalui Program Sertifikasi yang saat ini telah sampai pada tahapan/kegiatan pendataan ulang;
  2. Untuk lahan yang dikuasai pengembang dilakukan Program Penghijauan hingga Tahun 2006, sedangkan kegiatan pembangunan fisik perumahan baru dilakukan setelah hasil program penghijauan menampakkan hasil yang nyata;

#### **4.2.5. Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Margasenang Kecamatan Margacinta.**

Sebagaimana diketahui sampai tahun 2002 di Kota Bandung masih terdapat 62 titik kawasan kumuh kota yang tersebar di beberapa kecamatan, secara umum terbentuknya kawasan kumuh kota disebabkan oleh :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana permukiman yang tidak menunjang terbentuknya struktur permukiman dan sistem pengelolaan lingkungan.

2. Adanya kegiatan ekonomi dengan industri skala kecil maupun besar memiliki dampak terhadap lingkungan membutuhkan pelayanan tambahan dari penyediaan prasarana dan sarana baik secara fisik maupun teknologinya.
3. Terkonsentrasinya pemukiman pada beberapa lokasi yang menjadi sentra kegiatan industri kecil sehingga mengorbankan aspek kebutuhan ruang yang layak.
4. Rendahnya tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Karakteristik dari kawasan kumuh tersebut adalah :

1. Kepadatan bangunan yang tinggi
2. Kondisi prasarana dan sarana yang buruk secara kuantitatif dan kualitatif
3. kondisi lingkungan yang tidak didukung oleh sistem drainase dan pembuangan sampah yang memadai.
4. Tidak memiliki keteraturan struktur permukiman
5. permukiman di bantaran sungai yang terpengaruh secara fisik oleh adanya pengelolaan limbah oleh pabrik disekitarnya.

Penanganan dari 62 titik kawasan Kumuh Kota telah dilaksanakan melalui Program *Community Action Plan* atau lebih dikenal dengan istilah CAP yang dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat. Untuk tahun 2003 pelaksanaan CAP telah menunjuk lokasi penanganan Kawasan Kumuh Kota di Kelurahan Margasenang Kecamatan Margacinta, namun pada pelaksanaan penanganannya terhenti.

Sejalan dengan itu pada tahun 2006 akan di kembangkan kembali penanganan kawasan kumuh kota khususnya di Kelurahan tersebut sehubungan dengan telah siapnya dokumen-dokumen perencanaan di lokasi tersebut.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Kumuh Kelurahan Margasenang Kecamatan Margacinta adalah :

- a. Program penataan lingkungan permukiman
- b. Program penataan prasarana dan sarana kota
- c. Program pembinaan usaha kecil

Adapun Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penangan kawasan kumuh di Kelurahan Margasenang Kecamatan Margacinta tersebut meliputi :

1. Penanganan Masalah Air Bersih
2. Penanganan Air Limbah
3. Penanganan Persampahan

#### **4.2.6. Penataan Kawasan Industri Dalam**

Kawasan Industri Dalam termasuk dalam Kelurahan Arjuna. Sebagai percontohan pada lokasi tersebut telah dibangun rumah susun sebagai upaya perbaikan lingkungan yang kumuh. Pada tahap awal telah dibangun tiga blok rusun, yaitu Blok A, B dan C. Pada masa selanjutnya kondisi lingkungan rumah susun tidak terpelihara dan muncul lingkungan kumuh baru, serta untuk perbaikan bangunan dan sarana penunjangnya masih menggantungkan pada anggaran Pemerintah Kota. Salah satu

penyebab tidak terpeliharanya rumah susun tersebut adalah belum adanya bentuk pengelolaan yang baik.

Mengembangkan perumahan secara vertikal untuk wilayah dan atau kawasan yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada. Prasarana yang harus dipertimbangkan terutama ketersediaan kapasitas prasarana jalan dan air bersih. Meremajakan dan merehabilitasi lingkungan yang menurun kualitasnya, dan pengembangan rumah susun sederhana sewa lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungannya.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Industri Dalam adalah :

- a. Program penataan lingkungan permukiman
- b. Program penataan prasarana dan sarana kota
- c. Program pembinaan usaha kecil

Adapun Indikasi Kegiatan dalam rangka mengembangkan Kawasan Khusus Rumah Susun Industri Dalam adalah :

1. Sosialisasi rencana kegiatan
2. Penyepakatan rencana pengelolaan
3. Pembuatan disain teknis rumah susun baru berikut sarana dan prasarana penunjangnya
4. Pembebasan bangunan liar
5. Perbaikan bangunan berikut sarana dan prasarana penunjangnya
6. Pendampingan ekonomi masyarakat

#### **4.2.7. Penataan Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik serta pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung. Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bangunan pada kawasan ini dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan, serta tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungannya, termasuk dampak transportasi.

Menurut Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, ada 6 (enam) kawasan pelestarian kota, yaitu kawasan pusat kota bersejarah, kawasan Pecinan, kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan etnik sunda, kawasan perumahan vila dan kawasan industri lama. Kawasan pelestarian yang akan ditangani dalam Tahun Anggaran 2006 adalah kawasan perumahan villa Dipatiukur, Ir. H Juanda, Diponegoro, RE Martadinata, dan Cipaganti.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Cagar Budaya adalah :

- a. Program tata ruang dan penatagunaan tanah
- b. Program pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup
- c. Program peningkatan kualitas pengawasan
- d. Program peningkatan hukum

Indikasi Kegiatan untuk mengembangkan Kawasan Khusus Cagar Budaya ini adalah :

baik secara rutin maupun insidental. Seni tradisional Bejang, keindahan alam pegunungan di kaki gunung Manglayang Ujung Berung dikemas menjadi agenda tujuan wisata untuk mengimbangi kawasan utara dan selatan Bandung. Agrowisata seni dan budaya adalah kawasan wisata terpadu dengan pola penataan berwawasan lingkungan yang selaras dengan pelestarian seni budaya tradisional Sunda. Kegiatan pertanian (agro) tanaman pangan dijadikan latar belakang wisata, sehingga terwujud kawasan yang hijau, berbunga dan berbuah dengan kegiatan pelestarian seni budaya lokal.

Kawasan utama, adalah lokasi penataan lingkungan pagelaran atraksi seni budaya tradisional, yang didukung dengan berbagai fasilitas :

- Restoran dengan menyajikan makanan dan minuman khas Parahyangan
- Danau buatan dan dilengkapi *cottage-coitage* dengan nuansa arsitektur Sunda.
- Industri kecil : pembuatan batik tulis, pembuatan minyak keletik, pembuatan wayang golek, pembuatan kacapi suling, pembuatan angklung, calung, arumba, dan cinderamata.
- Bangunan atraksi pertunjukan seni tradisional dengan gaya arsitektur Sunda dan tidak menggunakan konstruksi beton.
- Penataan lingkungan hidup hutan kota hijau, berbunga dan berbuah yang dilengkapi dengan berbagai aneka tanaman langka.
- Arena pagelaran seni Helaran dan Gulat Benjang.

- Arena ketangkasan Domba.
- Lahan sawah dibiarkan tetap ada dan terpelihara.

Kawasan Penunjang : aneka tanaman di lingkungan pekarangan rumah untuk jenis tanaman keras produktif, tanaman keras pelindung, tanaman bunga hias, dan tanaman bunga komersial.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan Agrowisata Ujung Berung adalah :

- a. Program tata ruang dan penatagunaan tanah
- b. Program pengembangan agrobisnis
- c. Program pengembangan seni budaya daerah

Adapun kegiatan yang akan dan perlu dilaksanakan pada tahun 2006 di Kawasan Agrowisata Seni Budaya Ujung Berung meliputi :

1. Penataan Alun-alun untuk digunakan kegiatan Pasar Kreasi Budaya Lesehan Jajanan makanan dan minuman khas Parahyangan dan setiap malam Minggu digelar atraksi seni tradisional.
2. Penataan Pendopo menjadi Sanggar Budaya yang akan dijadikan tempat Pembinaan, Pelatihan dan Pagelaran Seni Budaya.
3. Pelatihan manajemen terpadu Garapan Agrowisata Seni Budaya.
4. Sosialisasi melalui Gerak Jalan Wisata Alam.
5. Gerakan penghijauan pekarangan rumah dan lahan kosong.

**BAB V**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**5.1. Agenda Pembangunan Tahun 2006**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat yang dijabarkan kedalam 6 misi dan dalam rangka menjawab isu strategis serta dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian target IPM, maka misi **Mengembangkan Perekonomian Kota Yang adil dan Misi Penataan Kota** diharapkan dapat menjadi penggerak untuk pelaksanaan misi-misi yang lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tema yang diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006 adalah " Memantapkan Penataan Kota dengan Memperkuat Struktur Ekonomi Kota Bandung Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan" dengan menitikberatkan pada **Upaya Menciptakan Lapangan Kerja melalui Peningkatan Investasi yang sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Sinergitas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Berdasarkan Potensi Kewilayahan** sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi disparitas kesejahteraan warga.

Disamping itu agenda pada tahun 2006 tersebut juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memicu dan memacu kreativitas & inisiatif stakeholder Kota Bandung untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Bandung. Dengan peran aktif warga/stakeholder tersebut diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance.

Agenda Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Membangun sinergitas pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) berbasis kewilayahan dalam berbagai sektor;
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi;
3. Meningkatkan kualitas pariwisata Kota Bandung;
4. Meningkatkan pengawasan mutu produk pertanian;
5. Meningkatkan kapasitas BUMD;
6. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin;
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin;
8. Meningkatkan keahlian dan keteampilan tenagakerja berbasis kompetensi;
9. Pengembangan wilayah Bandung Timur;

10. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur kota;
11. Meningkatkan pelayanan transportasi kota;
12. Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup;
13. Meningkatkan kualitas perencanaan kota;
14. Meningkatkan Kualitas pelayanan aparatur;
15. Pengembangan kemitraan dalam rangka mendukung pembiayaan dari berbagai aspek;
16. Meningkatkan seni budaya daerah & prestasi olah raga;
17. Pengembangan masalah sosial & pemberdayaan perempuan.

Ke 17 (tujuh belas) agenda tersebut dalam rangka mendukung 7 bidang prioritas sebagai berikut :

1. Pendidikan : Bandung Cerdas 2008
2. Kesehatan : Bandung Sehat 2007
3. Kemakmuran : Pencapaian LPE 11% Tahun 2008
4. Lingkungan Hidup : Bandung Hijau 2006
5. Seni dan Budaya : Bandung Kota Seni dan Budaya 2008
6. Olah Raga : Bandung Berprestasi 2008
7. Agama : Bandung Kota Agamis 2008

### 3.2. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2006

Program prioritas tersebut merupakan penjabaran dari agenda prioritas dalam rangka pencapaian IPM sesuai dengan target kesepakatan Bupati walikota se Jawa Barat untuk Kota Bandung sebesar 78,6 dengan rincian untuk indeks daya beli sebesar 71,1, indeks pendidikan sebesar 88,2 dan indeks kesehatan sebesar 76,4. Program tersebut sesuai dengan program yang tertuang dalam Renstra Kota Bandung, terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok Program yang terkait langsung dengan pencapaian IPM dan Kelompok Program Penunjang.

#### A. Kelompok Program Yang Terkait Langsung dengan IPM sebagai berikut :

1	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;	IDB
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;	IDB
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;	IDB
4	Program Pembinaan Usaha Kecil;	IDB
5	Program Peningkatan Investasi Kota;	IDB
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	IDB
7	Program Pengembangan Produk Kepariwisata;	IDB

RKPD Kota Bandung Tahun 2006

V - 4

8	Program pengembangan agribisnis	IDB
9	Program Pembinaan, Pengembangan Produktivitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan;	IDB
10	Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah;	IP
11	Program Pendidikan Menengah;	IP
12	Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;	IP
13	Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;	IPH
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;	IPH
15	Program Pemberdayaan Perempuan	IPH
16	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama.	IP
17	Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial;	IPH
18	Program Pengembangan Kawasan Gedebage;	IPM
19	Program Penataan Prasarana dan Sarana kota;	IPM
20	Program Pengembangan Penataan Transportasi kota;	IPM
21	Program pengembangan Kemitraan	IPM
22	Program Penataan Lingkungan Permukiman	IPH
23	Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah;	IPM
24	Program Peningkatan Perencanaan Kota;	IPM
25	Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya;	IPH
26	Program Peningkatan Kinerja BUMD;	IPM
27	Program Pengembangan dan Pengendalian	IPH

RKPD Kota Bandung Tahun 2006

V - 5

Lingkungan Hidup;

**B. Kelompok Program Yang Menunjang pencapaian IPM**

- 1 Program Pelayanan Kependudukan;
- 2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
- 3 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;
- 4 Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- 5 Program Pelayanan Prima;
- 6 Program Peningkatan Sistem Pembiayaan Pembangunan;
- 7 Program Peningkatan Hukum;
- 8 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 9 Program Pengembangan dan Pengamanan Asset Pemerintah kota.
- 10 Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota;
- 11 Program Peningkatan Kualitas Pengawasan;
- 12 Program Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- 13 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
- 14 Program Pengembangan Seni Budaya Daerah.
- 15 Program Peningkatan Partisipasi Politik;

- 16 Program Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan kota;
- 17 Program Peningkatan prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota

## **BAB VI**

### **RINGKASAN PENDANAAN**

Dilandasi oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pada penjelasan undang-undang tersebut disebutkan dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dan menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi. Selanjutnya untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan

standar akuntabilitas publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

### Prediksi Pendapatan Tahun 2006

1. Prediksi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp.1.108.912.798.881,3 yang terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.208.043.201.891,37
- Dana Perimbangan sebesar Rp.880.544.673.470,93,
- Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.20.324.923.519

2. Dengan Asumsi-asumsi sebagai berikut :

- Mengikuti trend/pola penerapan kebijakan pendapatan nasional & regional propinsi;
- Memperhatikan laju Inflasi Kota Bandung,
- Proyeksi pertumbuhan perekonomian kota,
- Dengan Asumsi Pendapatan tersebut tidak mencantumkan/menyertakan hasil dari PDAM dan Penjualan Asset kota.

### Prediksi Belanja Tahun 2006

- Prediksi Anggaran Belanja mengacu pada Pencapaian Visi dan 7 bidang prioritas pembangunan serta dalam rangka Pencapaian IPM yang dijabarkan kedalam Misi yang tercantum dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Pembangunan kota Bandung tahun 2004-2008
- Mengingat keterbatasan anggaran, maka pembagian alokasi anggaran per- Misi pembangunan didasarkan kepada komponen- komponen pencapaian IPM Kota Bandung, dimana komponen indeks daya beli pencapaiannya pada tahun 2004 sebesar 63,35 point, masih dibawah target Propinsi yaitu 64,90, sedangkan untuk indeks pendidikan dan indeks kesehatan pencapaiannya sudah diatas target propinsi, sehingga alokasi anggaran lebih menitikberatkan kepada pencapaian Misi Perekonomian Kota yang adil yang didukung dengan Misi Penataan Kota, sebagai penggerak untuk misi-misi yang lainnya, yang dilaksanakan secara bersinergi antar program, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius.
  - Anggaran Belanja diakomodasi dari Belanja Non Adum sebesar 15%;

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Peluang Hidup melalui Bandung sehat 2007 dan Indeks Pengetahuan melalui Bandung Cerdas 2008

2. Misi Mengembangkan Perekonomian Kota yang Adil.
  - Anggaran Belanja diakomodasi dari Belanja Non Adum sebesar 20%;  
Dalam rangka meningkatkan investasi sesuai dengan daya dukung lingkungan serta membangun sinergitas KUMKM yang berbasis kewilayahan guna peningkatan Indeks Daya Beli Masyarakat dan dalam rangka mendukung pencapaian LPE 11 % pada tahun 2008;
3. Misi Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang Ramah dan Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani.
  - Anggaran Belanja diakomodasi dari Belanja Non Adum sebesar 15%;
    - a. Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
    - b. Peningkatan kualitas Ketenagakerjaan berbasis kompetensi;

- c. Akselerasi pencapaian Bandung Berprestasi dan Agamis Tahun 2008.

4. Misi Meningkatkan Penataan Kota
  - Anggaran Belanja diakomodasi dari Belanja Non Adum sebesar 30%;  
Dalam rangka mendukung :
    - a. Peningkatan aktivitas perekonomian Kota Bandung;
    - b. Peningkatan pelayanan sarana & prasarana kota dan pengendalian lingkungan hidup.
    - c. Pencapaian Bandung Hijau 2006
5. Misi Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
  - Anggaran Belanja diakomodasi dari Belanja Non Adum sebesar 10%;
  - Sebagai upaya Peningkatan Kinerja Aparatur dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik.
6. Misi Mengembangkan system keuangan kota.
  - Anggaran Belanja diakomodasi dari Belanja Non Adum sebesar 10%;  
Dalam rangka :
    - a. Peningkatan Potensi PAD;
    - b. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan mengenai PAD.

<b>Prediksi Pendapatan Tahun 2006</b>	:	Rp	1.108.912.798.881,3
Prediksi Pengeluaran	:	Rp	
Sisa lebih tahun yang lalu	:	Rp	
Belanja Pegawai/Personalia	:	Rp	
<b>Pendapatan Asli Daerah (208.043.201.891,31)</b>			
- Pajak Daerah	:	Rp	133.147.649.210,-
- Retribusi Daerah	:	Rp	64.493.392.586,-
- Laba hasil milik daerah	:	Rp	--
- Lain-lain PAD yang Sah	:	Rp	10.402.160.095,-
<b>Dana Perimbangan (880.544.673.470,93)</b>			
- DAU	:	Rp	493.105.017.143,-
- DAK	:	Rp	--
- Bagi hasil pajak & bantuan keuangan dari propinsi	:	Rp	264.163.402.042,-
Lain-lain pendapatan yang sah	:	Rp	123.276.254.285,-
Pinjaman daerah	:	Rp	

## BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan pelaksanaan semua kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran yang mesyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan aspek yuridis yang berlaku.

Proses pencapaian keterpaduan dari sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan melalui tahapan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders, dalam menyusun kebijakan publik sehingga tercapai sinergitas dalam pencapaian program-program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja baik yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan stakeholders termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2006 dengan sebaik-baiknya;
  3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun masih mengikuti pola penganggaran berdasarkan Kepmen No. 29 Tahun 2000 tentang Anggaran berbasis kinerja;
  4. Sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun BLN (Bantuan Luar Negeri), maka setiap SKPD perlu menyusun Renja SKPD Tahun 2006;
  5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan dan perumusan kebijakan melalui program-program pembangunan yang telah disusun serta sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspek yuridis yang berlaku;
  6. Sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka

disusun serta sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspek yuridis yang berlaku;

6. Sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran (APBD) dan acuan yang harus dijabarkan oleh SKPD ke dalam Renja SKPD;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana alokasi anggaran dan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota secara berkala dan sewaktu-waktu jika diminta.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2006 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 melalui Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri no. 0259/M.PPN/1/2005. tanggal 20-1-2005 menyatakan bahwa RKPD Kota Bandung merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Bandung.

Dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kota Bandung diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah Kota Bandung dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum yang disebut forum SKPD kota Bandung atau forum gabungan SKPD Kota Bandung serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan pula penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Bandung harus memiliki dokumen rencana kerja SKPD Kota Bandung

(Renja SKPD) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, sesuai dengan RKPD Kota Bandung

Dengan adanya RKPD Kota Bandung diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari misi kota melalui RENSTRA 2004-2008, dapat lebih berfungsi dan mencapai sasaran.

Dari hasil evaluasi berbagai data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa program pembangunan yang ditetapkan kedalam 6 (enam) bidang misi pembangunan kota adalah sebagai berikut :

1. Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Komitmen pemerintahan kota untuk melaksanakan pembangunan sumber daya manusia yang handal dan religius memiliki makna bahwa masyarakat kota harus berilmu, terampil, sehat dan berdaya saing tinggi dengan mengedepankan moral yang kuat.

2. Misi Pengembangan Perekonomian Kota

Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal berdasarkan prinsip good governance dengan melibatkan seluruh stake holder dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi kota yang berbasiskan potensi daerah

3. Misi Pengembangan Sosial Budaya Kota

Komitmen pemerintah kota untuk mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati nurani.

4. Misi Peningkatan Penataan Kota

Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan penataan kota yang hakekatnya merupakan pengaturan ,pemanfaatan ruang kota, penyediaan infra struktur dan upaya peningkatan mutu lingkungan yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku bagi kepentingan kegiatan kota.

5. Misi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota

Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif , efisien, akuntabel dan transparan.

6. Misi Keuangan Kota

Komitmen pemerintah kota untuk mengembangkan sistem keuangan kota bersumber dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimanfaatkan secara efektif, efisien serta perlu disosialisasikan kepada semua stake holder yang terkait untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaannya, sehingga RKPD Kota Bandung 2006 berfungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan APBD Kota Bandung tahun 2006 , baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Sebagai pengikat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan kota Bandung untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inipun dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung secara merata.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

DADA ROSADA



RKPD Kota Bandung Tahun 2006

VIII- 4

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 689 TAHUN 2005  
TANGGAL : 6 September 2005

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<p>9 Peningkatan sekolah dasar yang didukung dengan pemerataan kualitas tenaga kependidikan;</p> <p>10 Peningkatan kepastakaan sekolah;</p> <p>11 Peningkatan terdb administrasi pendidikan.</p>			
		<p>2 Program Pendidikan Menengah;</p>	<p>1 Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan;</p> <p>2 Dilat begi kepala dan guru sekolah menengah dan kejuruan;</p> <p>3 Peningkatan manajemen berbasis sekolah;</p> <p>4 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan MBS yang didukung dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal;</p> <p>5 Pengembangan komitmen dengan stakeholder pendidikan;</p> <p>6 Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu;</p> <p>7 Pemerataan kualitas tenaga kependidikan;</p> <p>8 Pengembangan kepastakaan daerah;</p> <p>9 Peningkatan terdb administrasi pendidikan.</p>	<p>1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU, SMK dan MA;</p> <p>2 Monurnnya Angka Putus Sekolah;</p> <p>3 Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat;</p> <p>4 Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah sekolah menengah kejuruan;</p> <p>5 Meningkatnya Angka siswa yang melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi;</p> <p>6 Terlaksananya penyelenggaraan Yajih Belajar (Wajar) 12 tahun dalam mewujudkan Bandung Cerdas 2008;</p> <p>7 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan tingkat menengah;</p> <p>8 Meningkatnya bantuan kepada siswa yang berprestasi.</p>	<p>APBD I &amp; II</p> <p>APBD I &amp; II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD I &amp; II</p> <p>APBD I, II &amp; APBN</p> <p>APBD II</p>	<p>DINAS PENDIDIKAN</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksar
			10. Pengembangan kegiatan <i>link and match</i> antara dunia pendidikan dengan dunia Industri (DUDI).			
	3	Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kejar paket A, B dan C;</li> <li>2. Pembinaan generasi muda;</li> <li>3. Pelatihan kegiatan Peakbra, Pramuka, PMP, UKS, Lomba Tala Ujicara Bendera dan Pemilihan Siswa Talsidan;</li> <li>4. Peningkatan kelompok belajar;</li> <li>5. Pembinaan pemuda produktif;</li> <li>6. Pembinaan kursus-kursus rumpun kesehatan, jasa dan rumah tangga;</li> <li>7. Peningkatan pusat belajar mengajar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya potensi diri, pengetahuan dan keterampilan masyarakat</li> </ol>	APBD I, II & APBN	DINAS PENDID
	4	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan-perguruan tinggi</li> <li>2. Diklat teknis peneliti;</li> <li>3. Penyusunan rencana pemanfaatan hasil-hasil penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur peneliti;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian;</li> <li>3. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian.</li> <li>4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian;</li> </ol>	APBD II APBD II APBD II APBD II	KANTOR LITSA/ BAPPEDA, BI
	5	Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan sanitasi di tingkat individu, keluarga dan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Sarana Air Bersih (SAB), Jamban keluarga dan rumah sehat dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat.</li> </ol>	APBD I/II	DINAS KESEHA BPM

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			2. Peningkatan kesadaran perilaku dan pemberdayaan kesehatan serta keberanian masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat dan perantara aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungan ;</li> <li>3. Menurunnya penderita HIV dan AIDS.</li> </ol>	APBD II	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan lingkungan perumahan dan permukiman;</li> <li>4. Peningkatan kesehatan lingkungan dengan cara (1) pertemuan per umum (TTU), tempat makanan dan minuman (TPM), rumah sakit (RS) dan Industri;</li> <li>5. Peningkatan akses jalan terhadap perilaku bersih dan gigit;</li> <li>6. Peningkatan pencegahan bahaya NAPZA dan HIV;</li> <li>7. Peningkatan peran serta pria dalam kegiatan KIS</li> <li>8. Peningkatan kelahehan keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Meningkatkan partisipasi pria dalam kis</li> <li>8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan keluarga</li> </ol>	APBD I/II APBD II	BKB BKB
	6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan;</li> <li>2. Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan;</li> <li>3. Peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis dan non medis) dan media;</li> <li>4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;</li> <li>5. Peningkatan sarana &amp; prasarana KB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Angka Kesakitan;</li> <li>3. Menurunnya Wabah Penyakit Menular;</li> <li>4. Menurunnya Angka Kematian yang disebabkan oleh berbagai penyakit;</li> <li>5. Meningkatnya partisipasi dalam kesehatan ber KB</li> </ol>	APBD I/II APBD II APBD I/II APBD I/II APBD I/II	DINAS KESEHATAN RSUD UJUNGERUNG, RSB. ASTANAANYAR PKGM BKB

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<p>6 Pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan miskin;</p> <p>7 Pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;</p> <p>8 Pencegahan penyakit melalui imunisasi;</p> <p>9 Pemberantasan dan penanggulangan penyakit;</p> <p>10 Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;</p> <p>11 Peningkatan status gizi masyarakat.</p>	<p>6 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama kepada masyarakat kurang mampu;</p> <p>7 Meningkatkan usaha pelayanan kesehatan masyarakat;</p> <p>8 Menurunnya status gizi buruk pada bayi &amp; balita.</p>	<p>APBD /II/ dan APBN</p> <p>APBD /III</p> <p>APBD /II</p>	<p>DINAS KESEHATAN RSUD UJUNGBERUNG RSB. ASTANAANY PPXGHI</p>
		7 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya;	<p>1 Pengendalian dan pembinaan penyakutan / Penunanan obat, terlarang;</p> <p>2 Penanggulangan NAPZA;</p> <p>3 Pembinaan industri makanan dan minuman.</p>	<p>1 Terkendali penyalahgunaan obat terlarang dan NAPZA;</p> <p>2 Terbinanya industri makanan dan minuman.</p>	<p>APBD /III</p>	<p>DINAS KESEHATAN RSUD UJUNGBERUNG RSB. ASTANAANY PPXGHI</p>
		8 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;	<p>1 Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana ibadah dan tempat kegiatan keagamaan;</p> <p>2 Penyediaan prasarana dan sarana keagamaan;</p> <p>3 Pembinaan pemahaman dan pengamatan kegiatan keagamaan yang telah diordakan.</p>	<p>1 Tersedianya SDM tenaga penyuluh agama yang berkualitas;</p> <p>2 Terpeenuhnya prasarana dan sarana keagamaan umat beragama untuk meniatkan ibadah;</p> <p>3 Terwujudnya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan keagamaan;</p>	<p>APBD /III</p> <p>APBD /III</p> <p>APBD /III</p>	<p>BAGIAN KESRA, D AGAMA</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		9 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama.	<p>1 Penyempurnaan materi pendidikan agama;</p> <p>2 Pemasukan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dengan kurikulum pendidikan;</p> <p>3 Peningkatan kualitas guru-guru agama;</p> <p>4 Peningkatan metode dan proses proses pendidikan agama.</p>	<p>4 Terwujudnya peran &amp; partisipasi lembaga keagamaan (Ponpes, DKM, MUI, PGI, Majelis Ulama dan lainnya) dalam meningkatkan pemberdayaan umat;</p> <p>5 Meningkatnya pelayanan ibadah haji dan pengelolaan pengelolaan zakat;</p> <p>6 Terwujudnya kerjasama yang harmonis;</p> <p>7 Terwujudnya hubungan sinergis antar lembaga keagamaan dengan pemerintah kota.</p>	<p>APBD II</p> <p>APBD I &amp; II</p> <p>APBD I &amp; II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD II</p>	<p>BAGIAN KESRA, DEP AGAMA</p>
2	Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasis potensi daerah.	1 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;	<p>1 Peningkatan kemampuan SDM pelaku IKM melalui bimbingan teknis dan diklat;</p> <p>2 Peningkatan bantuan biaya operasional IKM industri kecil dan menengah;</p> <p>3 Pengendalian kegiatan usaha industri melalui administrasi perijinan;</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha industri yang memiliki daya saing serta dapat meningkatkan pendapatan labornan kerja;</p> <p>2 Tersedianya kegiatan industri yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan;</p> <p>3 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.</p>	<p>APBD I dan II</p>	<p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaks:
		2 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;	<p>4 Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; Penataan sentra-sentra Industri.</p> <p>1 Peningkatan jangkauan pemasaran melalui promosi (booklet, leaflet), gelar, tamu usaha, pameran, misi dagang serta penguatan informasi pasar melalui jaringan internet;</p> <p>2 Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha perdagangan melalui bimbingan teknis dan diklat;</p> <p>3 Peningkatan pengawasan mutu barang yang beredar;</p> <p>4 Peningkatan pemantauan/monitoring serta pelayanan informasi harga bagi masyarakat;</p> <p>5 Pengembangan data base perdagangan dan system informasi pasar;</p> <p>6 Pengembangan system distribusi barang dan jasa;</p> <p>7 Pengembangan pola kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar modern;</p> <p>8 Penataan sentra-sentra perdagangan;</p> <p>9 Pembangunan jaringan system informasi produk-produk unggulan guna mendorong pemasaran lokal, rasional dan ekspor.</p>	<p>1 Meningkatnya kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan;</p> <p>2 Meningkatnya kegiatan ekspor;</p> <p>3 Terpenuhiya ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat yang aman konsumsi dan terjangkau;</p> <p>4 Terbentuknya sistem informasi perdagangan;</p> <p>5 Meningkatnya penataan pada pasar tradisional.</p>	APBD I dan II	DINAS PERINDUS DAN PERDAG DAN DINAS KOP

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		3 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;	<p>10 Peningkatan fasilitas dan utilitas pasar;</p> <p>11 Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum para pedagang.</p> <p>1 Peningkatan dan penerapan kelembagaan koperasi;</p> <p>2 Peningkatan kualitas SDM; pembinaan dan pempurus koperasi;</p> <p>3 Peningkatan kemampuan, permodalan;</p> <p>4 Pengembangan usaha koperasi.</p>	<p>1 Meningkatnya jumlah lembaga koperasi yang aktif;</p> <p>2 Meningkatnya jumlah pemanfaatan modal sendiri pada koperasi;</p> <p>3 Meningkatnya jumlah anggota koperasi;</p> <p>4 Meningkatnya peranan koperasi dalam penyediaan barang dan jasa bagi anggota;</p> <p>5 Meningkatnya kesejahteraan anggota.</p>	APBD I dan II	DINAS KOPERASI
		4 Program Pembinaan Usaha Kecil;	<p>1 Peningkatan kualitas SDM UKM;</p> <p>2 Peningkatan akses permodalan;</p> <p>3 Peningkatan akses/pelebaran jangkauan pemasaran;</p> <p>4 Pembinaan teknis bagi usaha kecil;</p> <p>5 Perluasan jaringan usaha kecil;</p> <p>6 Peningkatan pola kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya.</p>	<p>1 Meningkatnya kemampuan usaha kecil dalam proses produksi dan pemasaran;</p> <p>2 Meningkatnya kemandirian usaha kecil;</p> <p>3 Meningkatnya daya saing usaha kecil;</p> <p>4 Meningkatnya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar.</p>	APBD	DINAS KOPERASI, BAG. EKONOMI
		5 Program Peningkatan Investasi Kota;	<p>1 Pelayanan prima dalam perijinan investasi;</p>	<p>1 Menurunnya hambatan/rintas pada investasi kota;</p>	APBD II	KPMD

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kemiripan dalam pembangunan sarana dan prasarana kota;</li> <li>Promosi potensi investasi terpadu dan komprehensif melalui pameran di dalam dan luar negeri serta melalui lekrakool internet;</li> <li>Deregulasi peraturan perijinan yang mengarah pada sistem pelayanan online;</li> <li>Peningkatan kerjasama dalam penanaman penanaman modal;</li> <li>Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal secara berkala dan bertahap;</li> <li>Penyusunan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses;</li> <li>Penyusunan peta profil dan basis data investasi berdasarkan prioritas daerah dan coracok pasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien dan efektif;</li> <li>Meningkatnya nilai dan jumlah penanaman modal dalam negeri dan asing;</li> <li>Terwujudnya sistem informasi potensi investasi;</li> <li>Meningkatnya pelayanan investasi;</li> <li>Meningkatnya caya tarik investasi kota.</li> </ol>		
		6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajian pengembangan promosi wisata;</li> <li>Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata;</li> <li>Mengadakan kegiatan promosi pariwisata melalui berbagai media secara nasional dan internasional;</li> <li>Pembangunan jaringan pariwisata global secara efektif dan terorganisasi;</li> <li>Pengembangan sistem informasi sarana wisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara;</li> <li>Berkembangnya usaha pariwisata;</li> <li>Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang pariwisata;</li> <li>Meningkatnya usaha pariwisata yg berawasan lingkungan;</li> <li>Terbangunnya sistem informasi pariwisata.</li> </ol>	APBD II	DINAS PARIWISA;

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		7 Program Pengembangan Produk Pariwisata;	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pagelaran pariwisata yang bermuansa seni budaya;</li> <li>Pelaksanaan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keragaman obyek wisata;</li> <li>Meningkatnya daya tarik obyek wisata;</li> <li>Terwujudnya penghargaan dan apresiasi terhadap kebudayaan dan keserian;</li> <li>Tersusunnya inventarisasi &amp; dokumentasi warisan budaya dan seni;</li> <li>Meningkatnya prasarana dan sarana pariwisata;</li> <li>Terwujudnya usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan.</li> </ol>	APBD II	DINAS PARIWISATA
		8 Program Peningkatan Agrobisnis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan usaha jasa pertanian;</li> <li>Melakukan penyuluhan dan pembinaan usaha pertanian;</li> <li>Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengelolaan komoditas pertanian/Kesmasvet;</li> <li>Peningkatan inovasi agrobisnis;</li> <li>Pemertayaan kegiatan usaha pertanian;</li> <li>Peningkatan prasarana dan sarana usaha pertanian;</li> <li>Pengembangan sistem informasi dan promosi agrobisnis;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya produk pertanian yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan;</li> <li>Tersedianya dan terdistribuskannya kebutuhan produk pertanian yang aman;</li> <li>Meningkatnya penelitian, pengembangan dan jasa perdagangan agrobisnis;</li> <li>Meningkatnya kegiatan usaha jasa pertanian.</li> </ol>	APBD I, II & APBN APBD I, II APBD I, II APBD I, II & APBN APBD II	DINAS PERTANIAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
3	Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.	1 Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama;	<p>8 Pengembangan kemitraan di bidang usaha serebiantik;</p> <p>9 Monitoring dan pengendalian mutu produk pertanian.</p> <p>1 Pemberian penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat;</p> <p>2 Peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, dai dan pemuka agama dan agamawan sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama;</p> <p>3 Pengembangan materi, meloda dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan;</p> <p>4 Pembinaan kerukunan hidup intern, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintiah;</p> <p>5 Pembudayaan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan ketahanan sosial masyarakat;</p> <p>6 Peningkatan fungsi dan mutu sarana ibadah di sekolah sebagai pendukung pendidikan karakter/akhlak siswa.</p>	<p>1 Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat dan aparat pemerintiah;</p> <p>2 Terciptanya dasar-dasar kerukunan hidup antarmat dan antara umat beragama;</p> <p>3 Terwujudnya harmoni sosial, integrasi sosial dan persatuan bangsa;</p> <p>Pembinaan kerukunan hidup.</p>	<p>APBD I, II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD I, II</p>	BAGIAN KESRA, D: AGAMA
		2 Program Pembinaan, Pengembangan Produktivitas dan Perifindongan Ketenagakerjaan;	<p>1 Pembinaan terhadap fasilitas kesejahteraan</p>	<p>1 Meningkatnya fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan</p>	APBD II	DINAS TENAGA KERJA

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<p>2 Penguasaan dan pengendalian hubungan industrial</p> <p>3 Penanganan permasalahan ketenagakerjaan</p> <p>4 Pergerakan, perumusan &amp; penetapan UMK Kota Bandung tahun 2007</p> <p>5 Bimbingan &amp; penyuluhan ketenagakerjaan</p> <p>6 Intensifikasi penguasaan tenaga kerja</p> <p>7 Bimbingan teknis tentang hak &amp; kewajiban tenaga kerja perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</p> <p>8 Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan No.13 Tahun 2003</p>	<p>2 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha &amp; pekerja</p> <p>3 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha &amp; pekerja</p> <p>4 Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha &amp; pekerja</p> <p>5 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja</p> <p>6 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja</p> <p>7 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja</p> <p>8 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja</p>	<p>APBD II</p> <p>APBD I, II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD I, II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD II</p>	
		3 Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi Sosial;	<p>1 Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>2 Penguasaan sistem informasi pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>3 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>4 Memfasilitasi tenaga masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;</p>	<p>1 Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial;</p> <p>2 Menurunnya jumlah penduduk miskin;</p> <p>3 Menurunnya/berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p>	<p>APBD II</p> <p>APBD II</p> <p>APBD II</p>	BAGIAN KESRA, KANTOR SOSIAL

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		4 Program Pemberdayaan Perempuan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sosialisasi advokasi tindak kekerasan terhadap perempuan;</li> <li>2 Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan;</li> <li>3 Pembinaan dan peningkatan kualitas dan peran perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan peran perempuan dalam aktivitas keluarga, masyarakat, pembangunan, dan pemeliharaan;</li> <li>2 Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan.</li> </ol>	<p>APBD I, II</p> <p>APBD III/BL</p>	<p>BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p>
		5 Program Pelayanan Kependudukan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan sarana penunjang kegiatan pelayanan pendaftaran &amp; pencatatan</li> <li>2 Intensifikasi pelayanan catatan sipil</li> <li>3 Peningkatan terbit administrasi kependudukan</li> <li>4 Intensifikasi penanganan penduduk komuter &amp; pelayanan identitas bagi penduduk jawa KIP di Kota Bandung</li> <li>5 Intensifikasi pengawasan &amp; pengendalian penduduk</li> <li>6 Kepedulian sosial kepada masyarakat tidak mampu di Kota Bandung</li> <li>7 Pengendalian penduduk secara alamiah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;</li> <li>2 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;</li> <li>3 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;</li> <li>4 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;</li> <li>6 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan;</li> <li>6 Terkendalinya penduduk secara alamiah &amp; meningkatnya keluarga sejahtera</li> <li>7 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap LPP alamiah</li> </ol>	<p>APBD II</p>	<p>DINAS KEPENDUDUKAN</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
	6 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran pemuda melalui pengembangan dan penyuluran bakat, minat, dan kreativitas generasi muda;</li> <li>2 Pemberdayaan generasi muda melalui dorongan, bimbingan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>3 Pengembangan faktor pendorong kreatif, kreativitas dan inovasi untuk menunjang perkembangan kemampuan menjadi satu kekuatan pembangunan;</li> <li>4 Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran olahraga melalui pengembangan dan penyuluran bakat, minat, dan kreativitas generasi muda;</li> <li>5 Pemberdayaan generasi muda melalui dorongan, bimbingan pendidikan dan pelatihan olahraga;</li> <li>6 Pengembangan prestasi olahraga untuk menunjang perkembangan olahraga sebagai salah satu kekuatan otonomian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan aktivitas kepemudaan yang menunjang perilaku kreatif, insiatif dan partisipatif dalam pengembangan budaya;</li> <li>2 Meningkatnya prestasi cabang-cabang olah raga;</li> <li>3 Meningkatnya aktifitas berprestasi.</li> </ol>	<p>APBD I, II</p>	<p>BAGIAN KEBA, DINAS PENDIDIKAN</p>
	7 Program Pengembangan Seni Budaya Daerah.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemberdayaan organisasi atau lembaga-lembaga budaya daerah dalam mengukung kegiatan ataupun forum komunikasi pengembangan seni budaya lokal;</li> <li>2 Penguatan potensi budaya daerah untuk mempertahankan budaya nasional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terpelihara dan terlestarikannya seni budaya daerah yang menunjang pengembangan kepariwisataan;</li> <li>2 Terwujudnya dan tergalinya budaya daerah yang dapat mawadahi dan menangkal dampak negatif arus globalisasi;</li> </ol>	<p>APBD II</p>	<p>DINAS PARIWISATA, DINAS PENDIDIKAN</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
4	Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan	<p>1 Program Pengembangan Kawasan Gedebage;</p> <p>2 Program Penataan Prasarana dan Sarana kota;</p>	<p>3 Peningkatan pemahaman dan pelestarian seni budaya daerah melalui seminar, forum komunikasi, lokakarya seni &amp; budaya daerah serta apresiasi seni</p> <p>1 Penyusunan rencana pengembangan kawasan Gedebage;</p> <p>2 Sosialisasi rencana pengembangan kawasan Gedebage ;</p> <p>3 Pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota;</p> <p>4 Pembaruan akses tol Gedebage;</p> <p>5 Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembangan kawasan Gedebage.</p> <p>1 Penyusunan rencana detail pembangunan over pass dan jalan-jalan baru;</p> <p>2 Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan;</p> <p>3 Pengendalian pendirian bangunan;</p> <p>4 Peningkatan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p>	<p>3 Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya yang representatif;</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah;</p> <p>Meningkatnya apresiasi budaya daerah.</p> <p>1 Tersusunnya rencana pengembangan kawasan Gedebage secara komprehensif;</p> <p>2 Terbangunnya akses tol Gedebage;</p> <p>3 Terbangunnya prasarana dan sarana penunjang pendukung pengembangan kawasan Gedebage.</p> <p>1 Tersusunnya desain-desain over pass dan jalan-jalan baru;</p> <p>2 Meningkatnya kondisi jalan-jalan kota;</p> <p>3 Meningkatnya kebersihan sungai dan saluran;</p> <p>4 Meningkatnya pengolahan dan penyediaan air bersih untuk keperluan warga kota;</p>	<p>APB D I, APBN</p> <p>APBD II, Swasta</p> <p>APBD I, II &amp; APBN</p>	<p>BAPPEDA, DINAS TATA KOTA, DINAS PERUMAHAN, DINAS BANGUNAN, DINAS BINA MARGA, DINAS PENGAIRAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERTAMANA, DAN PEMAKAMAN, KANTOR PERTANAHAN</p> <p>DINAS TATA KOTA, DINAS PERUMAHAN, DINAS BANGUNAN, DINAS BINA MARGA, DINAS PENGAIRAN, DINAS PASAR, DINAS PERTAMANA DAN PEMAKAMAN DINAS PENGELOLAAN DAN PENANGRIP ANGAN</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<p>5 Penyusunan rencana penanganan banjir perkotaan;</p> <p>6 Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan saluran drainase, alir limbah, pengaliran dan sungai;</p> <p>7 Pembebasan tanah untuk normalisasi sungai dan infrastruktur lainnya;</p> <p>8 Pembersihan sungai dan saluran;</p> <p>9 Penataan dan penerbitan omamen kota;</p> <p>10 Pengembangan sistem informasi dan forum diskusi dan komunikasi antara jalan, ga media massa masyarakat, para kwirauasaha dan pemerintah;</p> <p>11 Pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana pengendalian kebisingan.</p>	<p>5 Berkurangnya lokasi-lokasi banjir;</p> <p>6 Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB;</p> <p>7 Meningkatnya keterlibatan sarana dan ornament kota;</p> <p>8 Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran.</p>	<p>KEBAKARAN</p>	
3	Program Pengembangan Penataan Transportasi kota;	<p>1 Penyusunan rencana penanganan transportasi kota;</p> <p>2 Pengembangan dan Penataan Pos &amp; Telekomunikasi</p> <p>3 Pemeliharaan ATCS;</p> <p>4 Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;</p>	<p>1 Meningkatkan intensitas apemeliharaan alat-alat pengatur lalu lintas;</p> <p>2 Berturannya kamacand;</p> <p>3 Tersedianya Terminal angkutan penumpang umum, gedung gedung dan fasilitas parkir umum;</p>	<p>1 Meningkatnya intensitas apemeliharaan alat-alat pengatur lalu lintas;</p> <p>2 Berturannya kamacand;</p> <p>3 Tersedianya Terminal angkutan penumpang umum, gedung gedung dan fasilitas parkir umum;</p>	<p>APBD I, II dan APBN</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, BAPPEDA, UNIT PENGELOLA PARKIR</p>	

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaks
			<p>5 Sosialisasi dan pendekatan dialogis mengenai tertib berkendara;</p> <p>6 Pengawasan dan pengendalian lokasi parkir;</p> <p>7 Penataan dan pengembangan terminal dan sub terminal;</p> <p>8 Pengembangan system angkutan massal(SAUM).</p>	<p>4 Terwujudnya Jaringan transportasi untuk pelayanan aksesibilitas yang merata diseluruh wilayah Kota Bandung dengan menggunakan sistem Jaringan Pelembah (polder web);</p> <p>5 Meningkatnya keterbacaan jalur transportasi angkutan;</p> <p>6 Terfaksananya penataan rute angkutan umum di pengembang an Sistem Angkuta Umum Massal;</p> <p>7 Terpilihannya Jaringan jalan kota yang baik;</p> <p>Meningkatnya keefas an antar unit kerja terkait dalam peng aturan jalur transportasi angkutan;</p>	<p>APBD I, idan APBN</p>	<p>BADAN PENGE LINGKUNGAN I DINAS PERTAM DAN PEMAKAI DINAS PENCEG, DAN PENANGGULAN KEBAKARAN, I KEBERSIHAN</p>
		<p>4 Program Pengembangan car. Pengendalian Lingkungan Hidup;</p>	<p>1 Pembinaan dan p enyuluhan kegiatan lingkungan hidup;</p> <p>2 Penebihan dan pengendalian pencemaran air bawah tanah;</p> <p>3 Pembuatan sumur resapan dan peningkatan pengolahan peraanmahan;</p> <p>4 Peningkatan kali bersih;</p> <p>5 Peningkatan kualitas dan kuantitas tanah-lahan kota;</p> <p>6 Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH;</p> <p>7 Peningkatan penghijauan kota.</p>	<p>1 Terkendalinya pencem aran di bawah tanah, permukaan tanah dan di atas permukaan tanah;</p> <p>2 Meningkatnya prasana dan sarana pemukiman;</p> <p>3 Tersedianya pras ana pengolahan alternatif sampah dan limbah;</p> <p>4 Menurunnya timbunan sipora h.</p> <p>5 Meningkatnya kualitas idan resapan air;</p> <p>6 Meningkatnya pemahaman, rekomendasi dan perijinan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>7 Terfaksananya kasus-kasus pelang garan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>APBD I, idan APBN</p>	<p>BADAN PENGE LINGKUNGAN I DINAS PERTAM DAN PEMAKAI DINAS PENCEG, DAN PENANGGULAN KEBAKARAN, I KEBERSIHAN</p>

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
				<p>8 Meningkatnya intensitas pemeliharaan taman-taman kota dan hutan-butan kota;</p> <p>9 Meningkatnya upaya-upaya pencegahan pengalihan fungsi RTH;</p> <p>10 Terwujudnya upaya-upaya proporsi RTH.</p>		
	<p>5 Program Pengembangan Pemukiman dan Penataan Prasarana dan sarana Lingkungan.</p>	<p>1 Penyusunan rencana pemukiman Rumah Susun;</p> <p>2 Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun;</p> <p>3 Pembangunan Rumah Susun;</p> <p>4 Rehabilitasi kawasan perkotaan;</p> <p>5 Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kota</p>	<p>1 Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh;</p> <p>2 Meningkatnya kondisi lingkungan pemukiman sehat;</p> <p>3 Meningkatnya jangkauan pelayanan air bersih;</p> <p>4 Berkembangnya sistem perumahan vertikal dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan.</p>	<p>APBD I, II, APBN dan Swasta</p>	<p>DINAS PERUMAHAN, DINAS BANGUNAN, PD. KEBERSIHAN, PDAM</p>	
	<p>6 Program Tata Ruang dan Penataan Ruang;</p>	<p>1 Penyusunan rencana detail Tata Ruang Kota;</p> <p>2 Penyusunan "Zoning Regulation";</p> <p>3 Pembuatan prosedur perizinan pemukiman ruang kota;</p> <p>4 Pembuatan sistem informasi rencana Tata Ruang Kota;</p> <p>5 Pelaksanaan tertib administrasi perizinan.</p>	<p>1 Terfaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan di pusat primer Gedabace;</p> <p>2 Berkurangnya pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukkan;</p> <p>3 Meningkatnya proporsi RTH;</p> <p>4 Terkendalinya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	<p>APBD II</p>	<p>BAPPEDA, DINAS TATA KOTAKANTOR, PERTANAHAN, DINAS BANGUNAN</p>	

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
5	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota.	7 Program Pengembangan dan Penguasaan Asset Pemerintah kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyusunan basis data asset pemerintah kota;</li> <li>2 Pengajian dan pendayagunaan asset pemerintah kota;</li> <li>3 Penguasaan dan pengawasan asset pemerintah kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terbentuknya basis data aset-aset pemerintah kota;</li> <li>2 Terwujudnya aset pemerintah kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.</li> </ol>	APBD II	BAGIAN PERLENGKAPAN/ PERUM, DISAIR
		1 Program Peningkatan Hukum;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pembinaan terbit hukum dan hak asasi manusia;</li> <li>2 Evaluasi terhadap produk-produk hukum agar sesuai dengan dinamika perkembangan kota;</li> <li>3 Sosialisasi dan pendekatan dialogis produk-produk hukum baik daerah maupun nasional kepada masyarakat;</li> <li>4 Pelayanan bantuan hukum dan pembinaan PPNS;</li> <li>5 Publikasi serta penataan jaringan dokumentasi;</li> <li>6 Penerbitan naskah akademik;</li> <li>7 Perumusan dan penerbitan produk hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi, potensi daerah dan visi-misi kota;</li> <li>2 Meningkatnya kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>3 Terwujudnya penegakan hukum secara objektif dan adil;</li> <li>4 Ditegakannya/diseputukannya peraturan perundangan daerah yang lebih berkualitas.</li> </ol>	APBD II	BAGIAN HUKUM, SATPOL PP
		2 Program Peningkatan Partisipasi Politik;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaksanaan sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang partai politik;</li> <li>2 Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2004;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;</li> <li>2 Meningkatnya peran partai politik dalam pembangunan kota;</li> </ol>	APBD I, II	BPM, DISINKOM

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Politik;</li> <li>4 Terfasilitasinya sarana dan prasarana Parpol.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Terjaminnya hak-hak politik masyarakat dalam melakukan partisipasi politiknya, tanpa tekanan dan ancaman dari pihak manapun;</li> <li>4 Terwujudnya sarana dan prasarana Parpol;</li> <li>5 Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan tata pemerintahan yang baik.</li> </ol>		
		3 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemerintah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota.</li> </ol>	APBD II	ASISTEN TATA RAJA, BAG. UMUM, PERLENGKAPAN, DPPK, Satpol PP
		4 Program Peningkatan Perencanaan Kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyusun Peta Dasar Pembangunan Daerah;</li> <li>2 Menyusun Program Pembangunan Daerah;</li> <li>3 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah;</li> <li>4 Menyusun perencanaan umum pembangunan kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;</li> <li>2 Tersusunnya perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan program kerja tahunan daerah;</li> <li>3 Tersusunnya rencana-rencana detail teknis pembangunan fisik kota;</li> <li>4 Tersusunnya perencanaan umum pembangunan fisik dan non fisik yang meliputi bidang Sosial Budaya, Ekonomi &amp; Fisik dan Prasarana</li> </ol>	APBD II	BAPPEDA
		5 Program Pengembangan Aparatur Pemerintah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 Menyusun Rencana-rencana detail teknis pembangunan fisik kota.</li> <li>7 Melakukan pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah kota;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelayanan publik;</li> </ol>	APBD II	ASISTEN TATA RAJA, KANTOR

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2 Membuat sistem informasi kepegawaian kota;</li> <li>3 Melakukan analisis jabatan fungsional dan struktural.</li> <li>4 Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 Meningkatkan persentase tingkat produktivitas kerja PNS;</li> <li>3 Tersedianya standar penilaian kinerja aparatur.</li> <li>4 Meningkatnya profesionalisme aparatur yang mendorong jiwa kewirausahaan aparat;</li> <li>5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat;</li> <li>6 Meningkatnya kesejahteraan pegawai pada aparatur di lingkungan pemerintahan kota;</li> <li>7 Terpenuhi prosedur administrasi kepegawaian secara tepat waktu.</li> </ol>		<p>PENDIDIKAN DAN LATIHAN, BAGIAN KEPEGAWAIAN, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, DPPK, SATPOL PP, KECAMATAN</p>
		6 Program Pelayanan Prima;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyusunan petunjuk operasional dan prosedur tetap pelayanan pelanggan;</li> <li>2 Pembangunan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintahan kota;</li> <li>2 Berkurangnya waktu pelaksanaan prosedur perijinan.</li> </ol>	APBD I, II	ASISTEN TATA PRAJA, UNIT YANTAP, KPDE, DISINKOM, PUSARDA, SETWAN, KECAMATAN
		7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan kota;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota yang berhubungan dengan pengaturan arus masuk-keluar kendaraan;</li> <li>2 Penjelasan kerjasama dengan kota lain;</li> <li>3 Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan kabupaten-kota;</li> <li>4 Peningkatan kerjasama yang berifat inovatif dengan kabupaten-kota lain;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya peran pemerintah kota dalam melaksanakan kewenangan daerah otonomi;</li> <li>2 Meningkatnya kerjasama antar lembaga Pemerintah dan non pemerintah.</li> <li>3 Meningkatnya kerjasama dengan kota-kota di luar negeri</li> <li>4 Berkurangnya permasalahan yang terjadi di batas wilayah</li> </ol>	APBD II	BPOD

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		8 Program Pengembangan Kelembagaan dan Kelelaksanaan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 Kerjasama pembangunan prasarana kota di batas-batas wilayah kota-kabupaten.</li> <li>1 Pengkajian atas kinerja dinas, badan, dan lembaga teknis daerah atas dasar kewenangan yang dimilikinya;</li> <li>2 Penyusunan panduan tentang prosedur kerja bagi setiap unit kerja;</li> <li>3 Penyusunan sistem kerja bagi setiap unit kerja;</li> <li>4 Pengumpulan dan pemutakhiran database seluruh pegawai pada satuan-satuan unit kerja di lingkungan perangkat daerah pemerintahan kota;</li> <li>5 Pengumpulan dan pemutakhiran sistem dan data-data peraturan perundang-ar. Kelembagaan pemerintahan kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan kota;</li> <li>2 Terbentuknya organisasi pemerintah kota sesuai dengan kewenangan;</li> <li>3 Terwujudnya sistem kerja perangkat daerah yang efisien dan efektif;</li> <li>4 Terwujudnya prosedur kerja yang baku bagi seluruh perangkat daerah.</li> </ol>	APBD II	BPOD, BAG. ORGANISASI
		9 Program Peningkatan Kualitas Pengawasan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pembinaan secara intensif terhadap aparat pengawas;</li> <li>2 Penyusunan rencana kegiatan pengawasan yang terintegrasi dengan unit pengawasan lainnya;</li> <li>3 Pengawasan secara intensif dan pengawasan secara fungsional;</li> <li>4 Penyusunan standar kerja aparat pengawasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tersedianya aparat pengawasan yang handal, berahl, berwibawa dan profesional;</li> <li>2 Berkurangnya kasus yang berindikasi KKN;</li> <li>3 Tersedianya standar pengawasan yang efektif dan efisien;</li> <li>4 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penanganan aparat;</li> <li>5 Menurunnya jumlah uang yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi;</li> </ol>	APBD II	BAWASDA

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
				<p>6 Meningkatkan pemamase insiansi dan aparat pemerintah yang melaksanakan akuntabilitas kinerja (AKIP) secara transparan;</p> <p>7 Terwujudnya sistem pengaw asanyang terkoordinasi dengan aparat pengawasan lainnya berdasarkan kesetaraan.</p>		
		10 Program Peningkatan Keteraturan dan Keterbacaan Lingkungan.	<p>1 Penataan PKL;</p> <p>2 Pelaksanaan operasional penerbitan pelanggar Perda tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan;</p> <p>3 Pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan yang meng atung sanksi &amp; Perda K3</p> <p>4 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</p> <p>5 Pelaksanaan sidang yustisi dan pendataan terhadap para pelanggar Perda.</p>	<p>1 Meningkatkan intensitas penerbitan lingkungan;</p> <p>2 Berkurangnya gangguan ketertiban umum;</p> <p>3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban lingkungan;</p> <p>4</p> <p>5 Meningkatnya peran RSatPol P dan PPNS dalam mane gikan P s rda.</p>	APBD II	SATPOL PP, SPM, KECAMATAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
6	Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan oembananunan kota.	1 Program Peningkatan Sistem Pembiayaan Pembangunan;	<p>1 Pengembangan sistem komputerisasi untuk pemutakhiran data;</p> <p>2 Pensosialisasian pajak dan retribusi daerah;</p> <p>3 Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;</p> <p>4 Pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien;</p> <p>5 Pengopt-anagan sistem pembiayaan pembaruanan kota.</p>	<p>1 Tersusunnya APBD yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;</p> <p>2 Meningkatnya pendapatan keuangan kota dari berbagai sumber.</p>	APBD II	DIPENDA, BAG. KEUANGAN

No	Arah Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Sumber Dana	Pelaksana
		2 Program Peningkat Kinerja BUND;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perbaikan tarif jasa pelayanan perusahaan-perusahaan daerah;</li> <li>2 Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan-perusahaan daerah;</li> <li>3 Peningkatan laba perusahaan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan pelayanan perusahaan-perusahaan daerah;</li> <li>2 Meningkatkan laba perusahaan-perusahaan daerah.</li> </ol>	APBD II	BAGIAN EKONOMI, BAPPEDA
		3 Program Peningkatan dan pengembangan Kemitraan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota;</li> <li>2 Meningkatnya sumber-sumber keuangan kota.</li> </ol>	APBD II	BAGIAN EKONOMI, BP0D

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

